



2025 - 2029

RENCANA STRATEGIS

RENSTRA



DINAS PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA PONTIANAK



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak Tahun 2025-2029 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Kota Pontianak dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah..

Sebagai bentuk implementasi dari Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak sesuai Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 126 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak, dokumen ini menjadi acuan untuk meningkatkan kinerja Program Pembangunan bidang Pangan, Pertanian, Perikanan dan Peternakan sekaligus meningkatkan peran Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak dalam mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selama 5 (lima) tahun ke depan guna mewujudkan Misi ke-4 Wali Kota Pontianak “Mewujudkan Perekonomian Inklusif, Stabil, Produktif, Kreatif, dan Inovatif” dengan Tujuan Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berdaya saing.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Strategis ini. Semoga dokumen Rencana Strategis ini dapat menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan dan mengupayakan terwujudnya layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak. Kami juga sangat menghargai kritik dan saran dari berbagai pihak guna menyempurnakan dokumen Renstra di masa mendatang

Pontianak, September 2025

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Dasar Hukum.....	2
I.3 Maksud dan Tujuan	4
I.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
II.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	1
II.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	15
II.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	19
II.4 Kelompok Sasaran Layanan.....	23
II.5 Permasalahan Pelayanan dan Isu Strategis	24
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
III.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	1
III.2 Cascading Kinerja	4
III.3 Strategi dan Arah Kebijakan.....	14
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
IV.1 Program Kegiatan dan Subkegiatan	1
IV.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	65
IV.3 Pendapatan Asli Daerah	67
IV.4 Program Strategis Nasional.....	67
IV.5 Program Unggulan dan Prioritas Kepala Daerah	69
IV.6 Proyek Strategis.....	72
BAB VIII PENUTUP.....	1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Daftar Sumberdaya Manusia Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak Berdasarkan Golongan Ruang Pangkat	15
Tabel 2.2	Daftar Pejabat Struktural Pada Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak	15
Tabel 2.3.	Daftar Sumberdaya Manusia Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak Menurut Tingkat Pendidikan....	16
Tabel 2.4.	Daftar Pejabat Fungsional Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak	16
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan	22
Tabel 2.6	Isu Strategis Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan	34
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak	3
Tabel 3.2	Cascading Kinerja Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak	6
Tabel 3.3	Penahapan Renstra Perangkat Daerah	15
Tabel 3.4	Arah Kebijakan 2025-2029	16
Tabel 4.1	Program Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak	2
Tabel 4.2	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan	23
Tabel 4.3	Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	60
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan	65
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci	66
Tabel 4.6	Target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2026 – 2030	67
Tabel 4.7	Dukungan Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak terhadap Program Strategis Nasional	68
Tabel 4.8	Program Unggulan Kepala Daerah	69
Tabel 4.9	Program Prioritas Kepala daerah	70
Tabel 4.10	Rencana Proyek Strategis	72

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak yang berlandaskan pada RPJMD Kota Pontianak berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Wali Kota Pontianak dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kota Pontianak berkaitan dengan urusan Pangan, Kelautan dan Perikanan, Pertanian serta Peternakan.

Dalam menyusun Renstra Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan

rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah.

Renstra Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak Tahun 2025-2029 dilakukan sebagai bentuk pemutakhiran dan penyesuaian rencana pembangunan daerah sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adanya pemutakhiran tersebut mewajibkan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak harus menyesuaikan nomenklatur indikator subkegiatan selaras dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tersebut.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak Tahun 2025-2029 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

- Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2007-2020/27 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 Nomor 4) Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4);
 14. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 228);
 15. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 227);

16. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 126 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 126).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan acuan resmi bagi Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sekaligus menjadi acuan untuk menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah;
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Wali Kota Pontianak;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak Tahun 2025-2029 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota Pontianak dan

mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak;

2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung visi dan misi kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah serta Mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya dan Identifikasi permasalahan serta isu-isu strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menguraikan tujuan dan sasaran dengan bahasa yang jelas, ringkas dan mudah dipahami serta menggambarkan keterkaitan elemen-elemen perencanaan dalam suatu tabel/matrik. Serta Menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi yang terpilih

BAB VI PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Merumuskan program dan Kegiatan prioritas dari masing-masing strategi yang dipilih beserta indikator kinerja dan pagu indikatif juga memuat target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak merupakan gabungan dua instansi yaitu Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan dan Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mulai ditetapkan di tahun 2017. Perubahan struktur organisasi ini diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Pontianak,

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 126 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak secara umum mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Pangan, Pertanian dan Kelautan dan Perikanan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan dibidang pangan, pertanian dan perikanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang pangan, pertanian dan perikanan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pangan, pertanian dan perikanan;

- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota Pontianak yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan.

Adapun tugas dan fungsi masing-masing jabatan pada Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak adalah sebagai berikut:

- 1. Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin dan mengordinasikan program kerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan yaitu merumuskan kebijakan teknis, penyelenggaraan pelayanan umum, pengendalian dan pembinaan teknis yang berada dibawahnya agar tugas berjalan efisien dan efektif.

Untuk melaksanakan tugas pokok Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pangan, pertanian dan perikanan;
- b. Perumusan rencana kerja dibidang pangan, pertanian dan perikanan;
- c. Penyelenggaraan pelayanan umum dibidang pangan, pertanian dan perikanan;
- d. Pengendalian dan pembinaan teknis dibidang pangan, pertanian dan perikanan;
- e. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pangan, pertanian dan perikanan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain dibidang pangan, pertanian dan perikanan yang diberikan oleh Wali Kota.

2. Sekretaris Dinas

Tugas pokok Sekretaris Dinas adalah menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan Teknis, fasilitasi, koordinasi, monitoring, dan evaluasi di bidang kesekretariatan.

Untuk Melaksanakan Tugas fungsi Sekretaris Dinas adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan dibidang kesekretariatan;
- b. Perumusan program kerja dibidang kesekretariatan;
- c. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang kesekretariatan;
- d. Monitoring dan evaluasi kebijakan dibidang kesekretariatan;
- e. Pembinaan teknis dibidang kesekretariatan;
- f. Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang kesekretariatan;
- g. Pengelolaan administrasi kesekretariatan; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain dibidang kesekretariatan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Ruang lingkup bidang kesekretariatan meliputi umum dan kepegawaian, perencanaan, dan keuangan. Adapun ruang lingkup umum dan kepegawaian dilaksanakan oleh seorang Kasubbag Umum dan Aparatur yang memiliki tugas dan fungsi berikut ini:

Kasubbag Umum dan Aparatur

Kepala Subbagian Umum dan Aparatur mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang umum dan aparatur.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kasubbag Umum dan Aparatur mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja dibidang umum dan aparatur;
- b. Penyelenggaraan kegiatan dibidang umum dan aparatur berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan ;
- c. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang umum dan aparatur;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang umum dan aparatur; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain dibidang umum dan aparatur yang diberikan oleh Sekretaris.

Ruang lingkup tugas subbagian umum dan aparatur meliputi administrasi surat menyurat, fasilitasi pertemuan/rapat, urusan perlengkapan dan rumah tangga, penataan kelembagaan perangkat daerah, pelayanan data dan informasi, administrasi kepegawaian internal serta pelayanan publik.

3. Kepala Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Konsumsi Pangan

Tugas Pokok Kepala Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Konsumsi Pangan adalah Merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi dibidang ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Konsumsi Pangan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan;

- b. Penyusunan program kerja dibidang ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan;
- c. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan;
- d. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum dibidang ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan;
- e. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan;
- f. Pembinaan dan pengendalian teknis dibidang ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan;
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan;
- h. Pengelolaan administrasi dibidang ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain dibidang ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Ruang lingkup tugas bidang ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan meliputi ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan.

4. Kepala Bidang Pertanian

Kepala Bidang Pertanian adalah mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi dibidang pertanian.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Pertanian mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang pertanian;
- b. Penyusunan program kerja dibidang pertanian;

- c. Penyelenggraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang pertanian;
- d. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum dibidang pertanian;
- e. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pertanian;
- f. Pembinaan dan pengendalian teknis dibidang pertanian;
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang pertanian;
- h. Pengelolaan administrasi dibidang pertanian; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain dibidang pertanian yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Ruang lingkup tugas bidang pertanian meliputi pembinaan, penyediaan dan pengawasan budidaya, pasca panen untuk tanaman pangan dan hortikultura serta pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.

5. Kepala Bidang Peternakan

Kepala Bidang Peternakan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi dibidang peternakan.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Peternakan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang peternakan;
- b. Penyusunan program kerja dibidang peternakan;
- c. Penyelenggraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang peternakan;
- d. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum dibidang peternakan;

- e. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang peternakan;
- f. Pembinaan dan pengendalian teknis dibidang peternakan;
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang peternakan;
- h. Pengelolaan administrasi dibidang peternakan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain dibidang peternakan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Ruang lingkup tugas bidang peternakan meliputi perumusan kebijakan dan penyelenggaraan tentang produksi ternak serta pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner.

6. Kepala Bidang Perikanan

Kepala Bidang Perikanan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi dibidang perikanan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Kepala Bidang Perikanan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang perikanan;
- b. Penyusunan program kerja dibidang perikanan;
- c. Penyelenggraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang perikanan;
- d. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum dibidang perikanan;
- e. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang perikanan;
- f. Pembinaan dan pengendalian teknis dibidang perikanan;
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang perikanan;

- h. Pengelolaan administrasi dibidang perikanan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain dibidang perikanan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Ruang lingkup tugas bidang perikanan meliputi perumusan kebijakan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan pengembangan perikanan tangkap dan perikanan budidaya.

7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas

- 1) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas Daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- 2) Unit pelaksana teknis dinas sebagaimana pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi, yang ditentukan lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 126 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak, susunan organisasi pada Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak terdiri dari :

- 1. Kepala Dinas;
- 2. Sekretaris Dinas;
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur;
- 3. Kepala Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Konsumsi Pangan;
- 4. Kepala Bidang Pertanian;
- 5. Kepala Bidang Peternakan;
- 6. Kepala Bidang Perikanan;
- 7. Kepala Unit Pelaksana Teknis;

8. Kelompok Jabatan Fungsional.

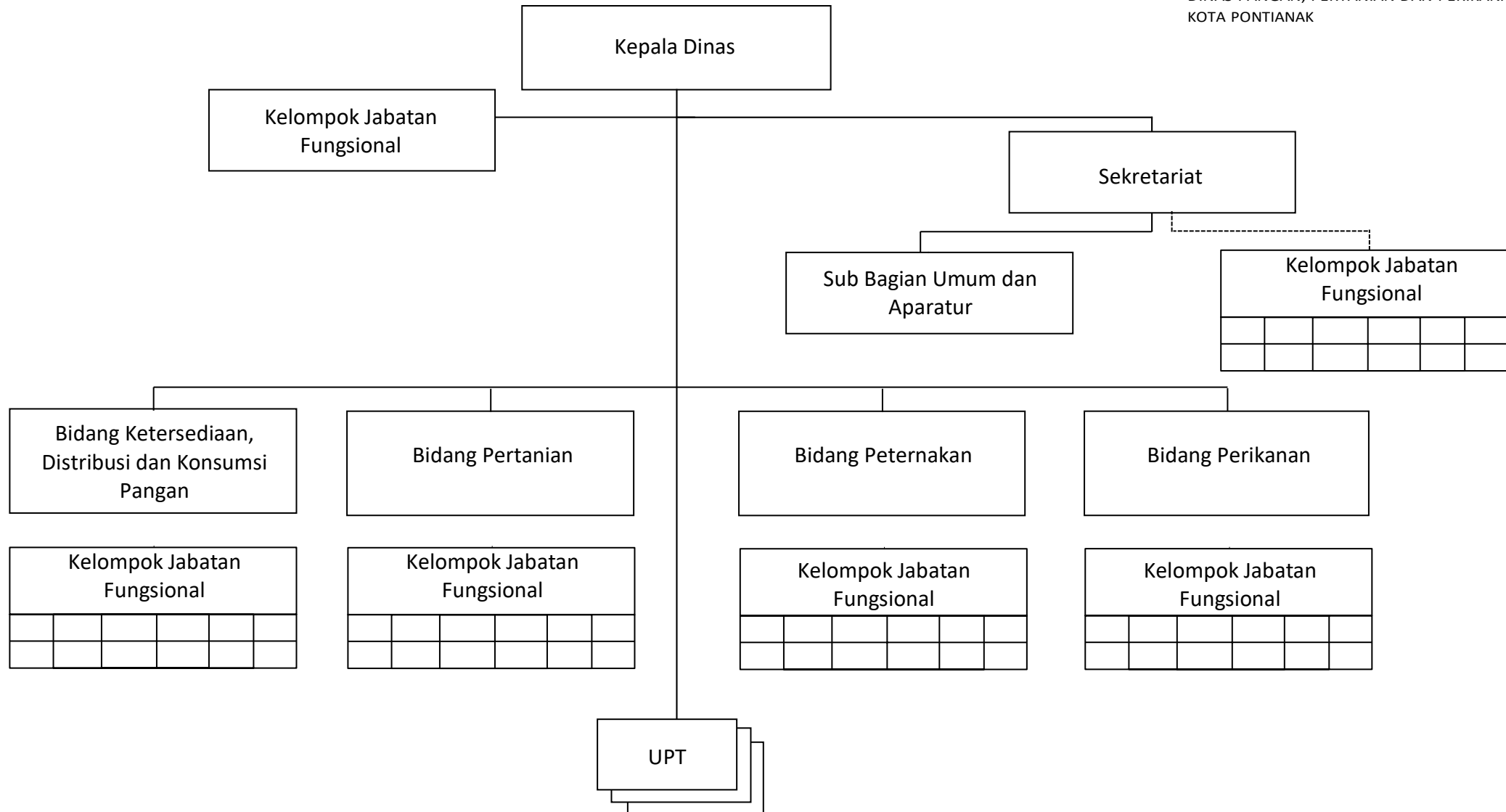
Secara rinci struktur organisasi Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini.

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA PONTIANAK

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 126 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA PONTIANAK



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumberdaya Manusia

Ketersediaan sumber daya manusia di Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak terdiri dari ASN sebanyak 80 (delapan puluh) orang dan petugas honor harian sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang. Secara rinci jumlah ASN berdasarkan golongan/ ruang pangkat dapat dilihat pada Tabel berikut ini

Tabel 2.1. Daftar Sumberdaya Manusia Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak Berdasarkan Golongan Ruang Pangkat

No	Golongan/Ruang Pangkat	Jumlah (orang)
1.	IV (Empat)	10
2.	III (Tiga)	36
3.	II (Dua)	3
4.	Gol. IX	14
5.	Gol. VII	4
6.	Gol. V	13
	Jumlah	80

Ket : Juli 2025

Tabel 2.2. Daftar Pejabat Struktural Pada Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak

No	Eselon/Non Eselon	Jumlah (orang)
1.	II (Dua)	1
2.	III (Tiga)	4
3.	IV (Empat)	5
4.	Non Eselon	70
	Jumlah	80

Ket : Juli 2025

Tabel 2.3. Daftar Sumberdaya Manusia Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak Menurut Tingkat Pendidikan

No	Golongan/Ruang Pangkat	Jumlah (orang)
1.	Strata III	-
2.	Strata II	18
3.	Strata I	36
4.	Diploma	9
5.	SLTA/Sederajat	16
6.	SLTP/Sederajat	1
7.	SD	-
	Jumlah	80

Ket : Juli 2025

Tabel 2.4. Daftar Pejabat Fungsional Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak

No	Golongan/Ruang Pangkat	Jumlah(orang)
1	Penyuluh Pertanian Madya	3
2	Penyuluh Pertanian Muda	5
3	Penyuluh Pertanian Pertama	3
4	Penyuluh Pertanian Terampil	1
5	Analisis Akuakultur Muda	1
6	Pengelola Produksi Perikanan	1
7	Tangkap Muda	2
8	Analisis Ketahanan Pangan Muda	1
9	Analisis Kebijakan Muda	2
10	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Muda	1
11	Pengawas Benih Tanaman Muda	1
12	Medik Veteriner Muda	4
13	Medik Veteriner Pertama	1
14	Paramedik Veteriner Terampil	1
15	Pranata Komputer Terampil PPPK	31
	Jumlah	80

Ket : Juli 2025

2. Kondisi Sarana dan Prasarana

Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak memiliki beberapa unit kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang terdiri dari:

A. UPT Agribisnis

UPT Agribisnis terletak di Jl. Budi Utomo Pontianak Utara merupakan tempat untuk pengembangan dan penyediaan bibit lidah buaya serta tempat wisata edukasi untuk masyarakat Kota Pontianak. Kondisi sarana dan prasarana yang ada di UPT Agribisnis untuk saat ini perlu dilakukan pembangunan dan peningkatan guna menarik masyarakat untuk berkunjung.

B. UPT Rumah Potong Hewan (RPH) Sapi

UPT Rumah Potong Hewan (RPH) Sapi terletak di Jl. Berdikari Pontianak Barat merupakan tempat untuk melayani pemotongan ternak sapi agar masyarakat memperoleh produk daging sapi yang ASUH (Aman Sehat Utuh dan Halal). RPH Sapi saat ini masih dalam tahap pembangunan.

C. Balai Benih Ikan (BBI)

Balai Benih Ikan (BBI) terletak di Jl. H. Rais Parit Mayor Pontianak Timur merupakan tempat untuk menghasilkan benih ikan berkualitas yang sesuai dengan standar Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) untuk menyuplai kebutuhan benih ikan bagi pembudidaya ikan yang ada di Kota Pontianak. Kondisi sarana dan prasarana yang ada di Balai Benih Ikan (BBI) cukup baik, namun masih dapat dilakukan peningkatan.

D. Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN)

Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN) terletak di kompleks UPT Agribisnis Jl. Budi Utomo Pontianak Utara merupakan tempat untuk melayani pemeriksaan kesehatan hewan dan ternak. Kondisi sarana dan prasarana baik.

E. Balai Benih Hortikultura (BBH)

Balai Benih Hortikultura (BBH) terletak di Jl. Flora Batu Layang Pontianak Utara merupakan tempat untuk menghasil bibit tanaman hortikultura yang berkualitas dan bersertifikat. Kondisi sarana dan prasarana Balai Benih Hortikultura (BBH) masih perlu di lakukan pembangunan dan peningkatan.

F. Kawasan Usaha Peternakan (KUNAK)

Kawasan Usaha Peternakan (KUNAK) terletak di Jl. Kebangkitan Nasional Pontianak Utara merupakan kawasan yang awalnya dirancang untuk menempatkan para peternak sapi yang ada di Kota Pontianak, sehingga di kawasan tersebut di bangun Tempat Pemotongan Hewan (TPH) Sapi untuk melayani pemotongan yang ada di wilayah Pontianak Utara dan Timur. Kondisi sarana dan prasarana perlu dilakukan pembangunan dan peningkatan.

G. Rumah Potong Hewan (RPH) Babi

Rumah Potong Hewan (RPH) Babi terletak di Jl. Kebangkitan Nasional Pontianak Utara merupakan tempat untuk melayani pemotongan ternak babi, sehingga masyarakat Kota Pontianak memperoleh produk yang ASU (Aman Sehat dan Utuh). Kondisi

sarana dan prasarana perlu dilakukan pembangunan dan peningkatan.

H. Balai Penyuluh Pertanian (BBP) Utara

Balai Penyuluh Pertanian (BBP) Utara terletak di Jl. 28 Oktober Pontianak Utara merupakan tempat untuk berkumpulnya para penyuluh pertanian untuk memberikan pelayanan bagi para petani yang ada di wilayah Pontianak Utara dan Timur. Kondisi sarana dan prasarana yang ada cukup baik, namun masih dapat dilakukan peningkatan.

I. Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Barat

Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Barat terletak di Jl. Berdikari Pontianak Barat merupakan tempat untuk berkumpulnya para penyuluh pertanian untuk memberikan pelayanan bagi para petani yang ada di wilayah Pontianak Barat, Kota, Selatan dan Tenggara. Kondisi sarana dan prasarana yang ada cukup baik, namun masih dapat dilakukan peningkatan.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak 2020 - 2024

- a. Ketersediaan energi dan protein dapat memenuhi kebutuhan karena tersedianya bahan pangan yang cukup sehingga ketersediaan energi dan protein dapat melebihi standar nasional, namun tetap harus dilakukan pemantauan pasokan pangan
- b. Ketersediaan bahan pangan di Kota Pontianak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, namun Pola konsumsi pangan masyarakat yang belum beragam dan bergizi

seimbang. Melakukan sosialisasi dan promosi pola konsumsi yang bergizi dan seimbang dan aman dan Peningkatan Akses pangan masyarakat terutama pada masyarakat ekonomi lemah.

- c. Realisasi Produksi Perikanan Budidaya mencapai target yang di tetapkan karena adanya dukungan masyarakat pembudidaya ikan dan penyuluh perikanan. Kerjasama yang baik dengan penyuluh perikanan dan masyarakat pembudidaya ikan tetap dipertahankan dan ditingkatkan agar produksi setiap tahunnya terus meningkat, terutama untuk memanfaatkan lahan pekarangan untuk memelihara ikan.
- d. Realisasi Produksi Perikanan tangkap secara umum mengalami peningkatan setiap tahunnya namun masih rendah dari target yang ditetapkan hal ini disebabkan masih terbatasnya sarana dan prasarana perikanan tangkap nelayan Perairan Umum Daratan (PUD), Sebagian besar armada tangkap adalah sampan bermotor berukuran lebih kecil dari 1 GT perairan umum daratan dan kondisi sampan bermotor nelayan PUD sudah banyak yang tidak layak beroperasi.
- e. Realisasi produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan berhasil mencapai target yang telah ditetapkan, meningkatnya jumlah produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan melalui pembinaan kepada kelompok, penumbuhan kelompok baru dan pemberian bantuan serta pengawasan kepada Unit Pengolahan Ikan atau Cold Storage
- f. Produktivitas tanaman pangan (padi, keladi dan ubi kayu) selama periode tahun 2020 s/d tahun 2024 secara umum masih dapat di kategorikan berhasil. Tercapainya sasaran

produktivitas tanaman pangan karena adanya dukungan masyarakat petani dan penyuluh pertanian. Kerjasama yang baik dengan penyuluh pertanian dan masyarakat petani tetap dipertahankan dan ditingkatkan agar produktivitas tanaman pangan setiap tahunnya terus meningkat. Sedangkan untuk produksi tanaman hortikultura (sayuran, buah-buahan dan biofarmaka) selama periode tahun 2020 s/d tahun 2024 untuk produksi tanaman sayuran dapat dikategorikan berhasil namun untuk produksi tanaman buah dan biofarmaka dikategorikan tidak berhasil dikarenakan produksi setiap tahunnya mengalami penurunan terutama sekali untuk tanaman biofarmaka (lidah buaya) hal ini sebabkan efek berantai dari pandemi covid yg terjadi tahun 2020 s/d 2021 yang mengakibatkan banyak industri rumah tangga tutup, yang notabene industri rumah tangga merupakan pangsa terbesar yang menyerap produksi yang dihasilkan petani, akibatnya luas lahan untuk menanam biofarmaka semakin berkurang.

- g. Secara umum target sasaran produksi daging ternak mengalami peningkatan terutama untuk periode 2023 s/d 2024, pada tahun tersebut yang paling tinggi mengalami peningkatan adalah produksi daging babi hal ini disebabkan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak kembali mengambil pengelolaan pemotongan babi yang sebelumnya dikerjakan oleh pihak ketiga. Sementara untuk pemotongan ternak sapi belum optimal pencapaian targetnya dikarenakan RPH sapi masih dalam tahap pembangunan serta pengetahuan dan kepedulian para pelaku usaha dalam penyediaan pangan yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal masih kurang misalnya ditandai dengan

adanya beberapa pengusaha yang melakukan pemotongan sapi di Tempat Pemotongan Hewan (TPH) ilegal yang notabene tidak diawasi untuk menghindari penarikan retribusi. Kedepannya guna semakin meningkatkan produksi daging ternak perlu adanya penertiban dan pengawasan untuk pemotongan ternak unggas yang ada di Kota Pontianak, untuk melaksanakan kegiatan pengawasan pemotongan ternak unggas diperlukan SDM peternakan yang cukup banyak serta harus bekerjasama dengan stakeholder dan instansi terkait.

Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Utama Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Periode Tahun 2020 s/d 2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Ketersediaan energi dan protein perkapita																		
	- Ketersediaan Energi per Kapita (Kkal/Kapita/ Hari)				2800	2.900	2.950	3.000	3.010	2.910	2.910	2.962	3.383	3210	1,04	1	1	1,13	1,06
	- Ketersediaan Protein per Kapita (Gr/Kapita/ Hari)				65	85	95	105	108	103,21	100,23	107,63	106,59	109,09	1,59	1,18	1,13	1,02	1,01
2	Peningkatan skor pola pangan harapan (konsumsi)				82	84	85	86	86	79,2	79,2	77,6	82,4	88,6	0,97	0,94	0,91	0,95	1,02
3	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)				210	213	219	222	235	228,93	219	223,68	225,2	248,97	1,09	1,03	1,02	1,01	1,06
4	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)				871,5	825,5	888,69	929,44	721	635,57	645	723,37	786,54	795,19	0,72	0,78	0,81	0,85	1,10
5	Produksi P2HP (Ton)				-	-	-	-	1730	-	-	-	-	1984,09	-	-	-	-	1,14
6	Produktivitas Tanaman Pangan (Ku/Ha)																		
	- Produktivitas Padi				32,45	33,99	35,54	37,08	37,31	33,99	37,05	36,94	34,42	28,6	1,05	1,09	1,04	0,92	0,77
	- Produktivitas Ubi Kayu				203,87	209,81	215,74	221,68	222,23	209,81	208,27	219,69	259,15	223,46	1,03	0,99	1,02	1,16	1,01
	- Produktivitas Keladi				147	154	161	168	141,68	154	140	140	140	143	1,05	0,91	0,87	0,83	1,01
7	Produksi Tanaman Hortikultura																		
	- Produksi Sayuran (Ton)				3.996,13	4.710,36	4.880,59	5.097,44	7.090,79	4.710,00	4.343,00	4.781,00	6217	5.978	1,18	0,92	0,98	1,22	0,84
	- Produksi Buah-buahan (Ton)				10.641,75	13.088,82	13.468,39	14.074,47	23.550,00	13.088,82	9.520,00	4.714,00	798	3.216,67	1,23	0,73	0,35	0,06	0,14
	- Produksi Biofarmaka (Kg)				11.600.433,89	19.859.840,00	20.435.775,36	21.355.385,25	2.257.500,00	19.859.840,00	14.663.446,00	1.852.443,00	1.815.886,00	1.869.885	1,34	0,74	0,09	0,09	0,83
8	Produksi Daging Ternak (Kg)				11.105.623,00	11.216.679,23	11.327.735,46	11.438.791,69	6.103.847,13	11.216.679,00	6.593.580,00	5.684.707,00	16.965.588,2	16.472.314	1,01	0,59	0,50	1,48	2,69

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

- a. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kondisi lingkungan dan keakraban untuk peningkatan pengembangan usaha. Kelompok tani sebagai pelaku utama menjadi salah satu kelembagaan pertanian yang berperan penting dan menjadi ujung tombak dalam pembangunan pertanian;
- b. Kelompok perikanan adalah kumpulan para pelaku utama yang terdiri dari nelayan, pembudi daya ikan, dan pengolah ikan yang terikat secara informal atas dasar keserasian dan kebutuhan bersama serta di dalam lingkungan pengaruh dan pimpinan seorang ketua kelompok pelaku utama perikanan;
- c. Pelaku usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan, dan peternakan;
- d. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan;
- e. Masyarakat umum yang berhubungan dengan pertanian, perikanan dan peternakan;
- f. Instansi Pemerintah yang berhubungan dengan pertanian, perikanan dan peternakan

2.5 Permasalahan Pelayanan dan Isu Strategis

2.5.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Kewenangan pembangunan urusan bidang pangan, bidang pertanian serta bidang kelautan dan perikanan Kota Pontianak dilaksanakan oleh Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak untuk mendukung misi Kota Pontianak.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi sebagai perangkat daerah, Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak juga terdapat hambatan yang menjadi permasalahan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi sebagai perangkat daerah yang mendukung ke empat Kota Pontianak yakni “*Mewujudkan Perekonomian Inklusif, Stabil, Produktif, Kreatif, dan Inovatif*”

Adapun permasalahan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Permasalahan Pembangunan Bidang Pangan

Beberapa permasalahan yang terkait dengan pembangunan bidang pangan, sebagai berikut:

- a. Sebagian besar ketersediaan/ pasokan bahan pangan tergantung pada pasokan pangan dari luar daerah (perdagangan antar pulau);
- b. Meningkatnya harga pangan pada Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
- c. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam penyelenggaraan mutu dan keamanan pangan;
- d. Belum tercapainya konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) sesuai dengan komposisi pola pangan harapan;
- e. Masih terdapat masyarakat yang rawan pangan dan gizi.

2. Permasalahan Pembangunan Bidang Pertanian

Beberapa permasalahan yang terkait dengan pembangunan bidang pertanian, sebagai berikut:

- a. Semakin berkurangnya lahan untuk pertanian, karena beralih fungsi menjadi perumahan dan lain-lain;

- b. Minimnya petani tanaman pangan dan hortikultura yang menggunakan agroinput pertanian sesuai anjuran/rekomendasi;
 - c. Beberapa komoditas pertanian memberikan andil yang cukup signifikan pada inflasi di Kota Pontianak seperti cabe, bawang merah, sawi, kangkung dan bayam;
 - d. Adanya pembatasan pupuk bersubsidi sesuai dengan Permentan No. 10 Tahun 2022 tentang cara penetapan alokasi dan HET pupuk bersubsidi sektor pertanian.
3. Permasalahan Pembangunan Bidang Peternakan
- Beberapa permasalahan yang terkait dengan pembangunan bidang peternakan, sebagai berikut:
- a. RPH Sapi masih dalam tahap pembangunan, sehingga jumlah pemotongan sapi tercatat menurun diduga pemotongan dilakukan diluar rumah potong hewan Pemerintah/tidak tercatat;
 - b. Lokasi rumah potong unggas terbesar (RPU AdilMart) pindah lokasi ke Kabupaten Kubu Raya sehingga mempengaruhi jumlah produksi/pemotongan unggas;
 - c. Kondisi RPH Babi perlu dilakukan pembangunan dan peningkatan untuk memenuhi persyaratan sebagai rumah potong;
 - d. Pengetahuan dan kepedulian para pelaku usaha dalam penyediaan pangan yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal masih kurang misalnya ditandai dengan adanya beberapa pengusaha yang melakukan pemotongan sapi di Tempat Pemotongan Hewan (TPH) ilegal yang notabene tidak diawasi untuk menghindari penarikan retribusi;
 - e. Penataan pemotongan unggas yang memenuhi aspek Aman, Sehat, Utuh, dan Halal dan hygiene sanitasi masih menjadi tugas tersendiri bagi Pemerintah Daerah;
 - f. Banyak beredar obat-obatan ilegal tanpa izin Kementan untuk

hewan/ ternak di petshop/poultry shop;

g. Masih terjadi wabah penyakit zoonosis terutama Rabies dan Avian Influenza/flu burung.

4. Permasalahan Pembangunan Bidang Perikanan

Beberapa permasalahan yang terkait dengan pembangunan bidang perikanan, sebagai berikut:

- a. Terbatasnya alat tangkap yang dimiliki nelayan khususnya alat tangkap Bubu ikan;
- b. Aktifitas penangkapan ikan terkendala oleh cuaca sehingga nelayan tidak bisa melaut karena cuaca buruk.

2.5.2 Isu Strategis

Tujuan dan Sasaran Strategis (SS) yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pangan Nasional (Bapanas) periode Tahun 2025-2029 adalah:

Tujuan Bapanas:

a. Kedaulatan Pangan:

Kondisi di mana negara memiliki kemampuan untuk menentukan kebijakan pangan sendiri, termasuk dalam hal produksi, distribusi, dan konsumsi pangan, tanpa tergantung pada pihak lain.

b. Kemandirian Pangan:

Kondisi di mana negara memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya dari produksi dalam negeri, dengan mengurangi ketergantungan pada impor.

c. Ketahanan Pangan:

Kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat baik secara kuantitas maupun kualitas, serta aman, bergizi, dan terjangkau.

Sasaran Bapanas :

a. Peningkatan Ketersediaan Pangan:

Memastikan ketersediaan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat, baik dari produksi dalam negeri maupun cadangan pangan nasional.

b. Peningkatan Keterjangkauan Pangan:

Memastikan harga pangan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, sehingga tidak ada masyarakat yang kesulitan mengakses pangan karena harga yang terlalu tinggi.

c. Peningkatan Pemanfaatan Pangan:

Memastikan pangan yang tersedia dimanfaatkan secara optimal, termasuk dalam hal gizi dan diversifikasi pangan, untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Isu strategis yang menjadi fokus Bapanas dalam Renstra 2025-2029:

a. Peningkatan Ketahanan Pangan:

Bapanas akan berupaya meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat.

b. Penurunan Stunting:

Bapanas akan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menurunkan angka stunting melalui program gizi yang tepat dan intervensi lainnya.

c. Penguatan Logistik Pangan:

Bapanas akan berupaya memperkuat sistem logistik pangan nasional untuk memastikan ketersediaan pangan yang efisien dan efektif dari produsen hingga konsumen.

d. Pengendalian Inflasi Pangan:

Bapanas akan berupaya mengendalikan inflasi pangan dengan berbagai kebijakan dan program yang mendukung stabilitas harga pangan.

e. Pencapaian Kemandirian Pangan:

Bapanas akan berupaya mencapai kemandirian pangan melalui peningkatan produksi dalam negeri, diversifikasi pangan, dan pengembangan potensi pangan lokal.

f. Peningkatan Daya Saing Produk Pertanian:

Bapanas akan mendorong peningkatan daya saing produk pertanian nasional melalui penerapan teknologi pertanian modern dan berkelanjutan.

g. Peningkatan Tata Kelola Pangan:

Bapanas akan berupaya meningkatkan tata kelola pangan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Tujuan dan Sasaran Strategis (SS) yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian periode Tahun 2025-2029 adalah :

Tujuan Kementerian Pertanian:

a. Kedaulatan Pangan:

Mencapai kemandirian pangan nasional, di mana Indonesia mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa terlalu bergantung pada impor.

b. Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing:

Meningkatkan nilai jual produk pertanian melalui diversifikasi produk, pengolahan pasca panen, dan penerapan teknologi modern.

c. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Prasarana:

Meningkatkan kualitas petani dan tenaga kerja pertanian, serta mengembangkan infrastruktur pertanian yang memadai

Sasaran Kementerian Pertanian:

a. Ketersediaan Pangan:

Memastikan ketersediaan pangan yang cukup dan stabil untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat.

b. Produksi dan Produktivitas Pertanian:

Meningkatkan produksi dan produktivitas berbagai komoditas pertanian, baik tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, maupun peternakan.

c. Kesejahteraan Petani:

Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani melalui berbagai program peningkatan produktivitas, akses pasar, dan pengembangan usaha tani.

d. Sistem Pertanian Berkelanjutan:

Menerapkan praktik-praktik pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, seperti pertanian organik dan penggunaan pupuk hayati.

e. Reformasi Birokrasi:

Mewujudkan birokrasi Kementan yang bersih, efektif, efisien, dan transparan.

Isu-isu Strategis Kementerian Pertanian:

1. Ketahanan Pangan:

Memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan keamanan pangan bagi seluruh masyarakat.

2. Peningkatan Daya Saing:

Meningkatkan daya saing produk pertanian Indonesia di pasar domestik dan internasional.

3. Kesejahteraan Petani:

Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani melalui berbagai program dan kebijakan.

4. Penyediaan Sarana Produksi:

Memastikan ketersediaan benih, pupuk, alsintan, dan sarana produksi pertanian lainnya yang berkualitas dan terjangkau.

5. Pengembangan Inovasi:

Mendorong inovasi teknologi pertanian, termasuk mekanisasi, digitalisasi, dan penerapan teknologi pertanian modern.

6. Reformasi Birokrasi:

Penyederhanaan birokrasi, penataan organisasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kementerian Pertanian.

7. Pengembangan SDM Pertanian:

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pertanian melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kompetensi.

8. Pengelolaan Sumber Daya Alam:

Pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

9. Pengendalian Iklim Ekstrim:

Mengatasi dampak perubahan iklim terhadap sektor pertanian, termasuk kekeringan, banjir, dan cuaca ekstrem.

10. Peningkatan Infrastruktur Pertanian:

Membangun dan memperbaiki infrastruktur pertanian, termasuk jalan usaha tani, irigasi, dan gudang penyimpanan.

11. Pengembangan Hilirisasi Produk Pertanian:

Meningkatkan nilai tambah produk pertanian melalui pengembangan industri pengolahan dan pemasaran.

12. Pengendalian Hama dan Penyakit:

Mengendalikan hama dan penyakit tanaman serta ternak untuk mengurangi kerugian hasil panen.

Tujuan dan Sasaran Strategis (SS) yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kelautan dan Perikanan periode Tahun 2025-2029 adalah:

Tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan:

- a. Kesejahteraan Masyarakat: Meningkatkan kesejahteraan nelayan, pembudidaya, pengolah, dan pedagang hasil perikanan;
- b. Kelestarian Sumber Daya: Meningkatkan pelestarian dan pengendalian sumber daya perikanan dan kelautan;

- c. Peningkatan Produksi: Meningkatkan produksi, produktivitas, dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan;
- d. Pengembangan Industri: Mendorong pengembangan industri perikanan yang berdaya saing;
- e. Konsumsi Ikan: Meningkatkan konsumsi ikan masyarakat.

Sasaran Kementerian Kelautan dan Perikanan:

- a. SDM Profesional: Mewujudkan sumber daya manusia kelautan dan perikanan yang profesional dan berdaya saing;
- b. Inovasi Teknologi: Menerapkan inovasi teknologi untuk mendukung pembangunan kelautan dan perikanan;
- c. Tata Kelola Baik: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan KKP;
- d. Konservasi: Meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati perairan;
- e. Pencegahan Kerusakan: Mencegah dan memulihkan kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil;
- f. Pelayanan Publik: Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kelautan dan perikanan, termasuk perizinan;
- g. Investasi: Meningkatkan peluang investasi dan kerja sama dengan pemangku kepentingan;
- h. Keamanan Pangan: Meningkatkan keamanan dan mutu hasil kelautan dan perikanan;
- i. Penyuluhan: Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Isu strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan:

- 1. Peningkatan Kesejahteraan Nelayan dan Masyarakat Perikanan:
 - a. Meningkatkan pendapatan dan taraf hidup nelayan melalui berbagai program pemberdayaan dan bantuan;
 - b. Memastikan akses nelayan terhadap sumber daya perikanan yang berkelanjutan; dan
 - c. Membangun kapasitas nelayan melalui pelatihan dan pendidikan vokasi.

2. Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan:
 - a. Melaksanakan penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota untuk menjaga keberlanjutan sumber daya;
 - b. Menerapkan zonasi wilayah laut dan pesisir untuk pengelolaan ruang laut yang optimal;
 - c. Melestarikan ekosistem laut dan pesisir, termasuk terumbu karang dan mangrove; dan
 - d. Mengendalikan pencemaran laut dan perairan pesisir.
3. Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan:
 - a. Meningkatkan kualitas dan keamanan produk kelautan dan perikanan;
 - b. Mengembangkan sistem ketertelusuran produk perikanan;
 - c. Mendorong inovasi dan hilirisasi produk perikanan; dan
 - d. Membuka akses pasar yang lebih luas untuk produk kelautan dan perikanan.
4. Penguatan Tata Kelola Kelautan dan Perikanan:
 - a. Menegakkan hukum dan aturan terkait pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - b. Meningkatkan koordinasi antarinstansi terkait dan pemangku kepentingan; dan
 - c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
5. Isu-Isu Lingkungan:
 - a. Mengatasi masalah sampah plastik di laut;
 - b. Melindungi keanekaragaman hayati laut; dan
 - c. Mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim yang mempengaruhi sektor kelautan dan perikanan.

Pada Renstra Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak tahun 2025-2029, memiliki tujuan dan sasaran serta indikator kinerja utama yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Kementerian Pertanian serta

Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tujuan Renstra tahun 2025-2029 Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak, adalah “ Meningkatkan kontribusi sektor pertanian dan perikanan dalam perekonomian serta meningkatnya ketahanan pangan” dengan sasaran untuk masing- masing bidang : 1) Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Konsumsi Pangan dengan sasaran “Meningkatnya Ketersediaan dan Konsumsi Pangan Per Kapita”, 2) Bidang Perikanan dengan sasaran “Meningkatnya produksi hasil kelautan dan perikanan”, 3) Bidang Pertanian dengan sasaran “Meningkatnya Produktivitas Tanaman Pangan dan Produksi Tanaman Hortikultura” dan 4) Bidang Peternakan dengan sasaran “Meningkatnya Produksi Hasil Peternakan”.

Berdasarkan PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 2 TAHUN 2013 tentang RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2013-2033 pasal 31 kawasan peruntukan lainnya adalah:

1. Kawasan peruntukan pertanian meliputi:
 - a. kawasan peruntukan pertanian hortikultura seluas 775 hektar di Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara;
 - b. kawasan peruntukan peternakan seluas kurang lebih 170 hektar di Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara.
2. Kawasan peruntukan perikanan meliputi:
 - a. Kawasan perikanan budidaya meliputi sepanjang kanan kiri tepian Sungai Kapuas mulai dari persimpangan Sungai Kapuas-Sungai Landak sampai Kelurahan Parit Mayor dan sepanjang kanan kiri tepian Sungai Landak sampai Kelurahan Siantan Hulu;
 - b. Pusat Pemasaran Ikan Hias (Raiser) sebagai pusat pengembangan bibit ikan hias yang berdaya jual tinggi yang berlokasi di jalan Parit Pangeran;

- c. Balai Benih Ikan selanjutnya disingkat (BBI) sebagai wadah pendistribusian benih ikan air tawar di Kalimantan Barat yang berlokasi di Kelurahan Parit Mayor Kecamatan Pontianak Timur.

Berdasarkan pola ruang yang tertuang pada RTRW Kota Pontianak, kegiatan pertanian potensial Kota Pontianak dialokasikan di Kecamatan Pontianak Utara. Potensi utama yang ditonjolkan adalah komoditas pertanian yang mencirikan Kota Pontianak seperti lidah buaya (Aloe Vera), sayuran daun, Pepaya dan lain-lain. Berbagai program dan kegiatan prioritas sebagai bentuk pelayanan SKPD telah dan akan dilakukan pada kawasan tersebut.

1. Kawasan peternakan adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terintegrasi dengan subsektor lainnya sebagai komponen usahatani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses industri hulu sampai hilir. Kawasan budidaya peternakan pada saat ini relatif semakin sulit dijumpai di tingkat kabupaten/kota, karena kompetisi penggunaan lahan semakin tinggi dan dukungan pemerintah daerah yang terbatas. Di lain pihak, kebutuhan dan konsumsi daging semakin meningkat seiring dengan penambahan penduduk dan usia serta kesejahteraan penduduk yang semakin baik;
2. Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tertuang di dalam RTRW Kota Pontianak digunakan sebagai kawasan pengembangan pertanian dan penghijauan Kota Pontianak yang sejalan dengan visi Kepala Daerah Kota Pontianak.

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk

manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Isu KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) yang relevan dengan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak antara lain:

- Ketahanan Pangan: Memastikan ketersediaan pangan yang cukup, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau bagi masyarakat Kota Pontianak;
- Pembangunan Berkelanjutan: Menyelaraskan kebijakan, rencana, dan program dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
- Pengelolaan Lingkungan: Mengatasi isu lingkungan dengan infrastruktur hijau dan pengelolaan yang efektif untuk menjaga keseimbangan ekosistem;
- Pengembangan Agribisnis: Meningkatkan ketahanan pangan dan pertanian berbasis agribisnis untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani

Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak tersebut di atas serta dinamika permasalahan di lapangan, maka isu-isu strategis Dinas dalam penyelenggaraan pembangunan bidang Pangan, pertanian, dan perikanan di Kota Pontianak masih dihadapkan pada beberapa isu aktual dan strategis yaitu:

Tabel 2.6 Isu Strategis Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	Sebagian besar ketersediaan/pasokan bahan pangan tergantung pada pasokan pangan dari luar daerah (perdagangan antar pulau).	1. Ketahanan Pangan: Memastikan ketersediaan pangan yang cukup, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau bagi masyarakat Kota Pontianak 2. Pembangunan Berkelanjutan: Menyelaraskan kebijakan, rencana, dan program dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat 3. Pengelolaan Lingkungan: Mengatasi isu lingkungan dengan infrastruktur hijau dan pengelolaan yang efektif untuk menjaga keseimbangan ekosistem 4. Pengembangan Agribisnis: Meningkatkan ketahanan pangan dan pertanian berbasis agribisnis untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani	Salah satu tujuan SDG's Tahun 2030, yaitu TPB 2 Tanpa Kelaparan	Asta cita 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru. Program Prioritas: Menjamin ketersediaan pupuk, benih dan pestisida langsung ke petani	Konektivitas distribusi daerah sentra produksi dengan daerah pemasaran/konsumen.	Kota Pontianak bukan sentra produksi pangan
	Adanya pembatasan pupuk bersubsidi sesuai dengan Permentan No. 10 Tahun 2022 tentang cara penetapan alokasi dan HET pupuk bersubsidi sektor pertanian.					Pengembangan Diversifikasi Pangan
	Semakin berkurangnya lahan untuk pertanian, karena beralih fungsi menjadi perumahan dan lain-lain					Stabilisasi harga pangan di Kota Pontianak
						Kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain terhadap pangan segar asal tumbuhan yang membahayakan kesehatan
						Belum optimalnya ketersediaan prasarana pertanian
						Kapasitas kelembagaan petani dan pelaku agribisnis yang masih rendah
						Semakin berkurangnya lahan budidaya pertanian

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Tanaman lidah buaya, tanaman sayur	Semakin berkurangnya lahan untuk pertanian, karena beralih fungsi menjadi perumahan dan lain-lain		Tujuan SDG's Tahun 2030 yaitu TPB 8 Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi;	Industrialisasi: hilirisasi komoditas unggulan hingga produk akhir dan industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor Asta cita 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Pengembangan pusat-pusat industri di wilayah Kalimantan melalui (i) hilirisasi komoditi unggulan (kelapa sawit, batubara, migas, dan hasil hutan) dan (ii) berbasis teknologi tinggi berkelanjutan seperti industri oleochemicals, petrochemicals, industri farmasi maju, industri kendaraan listrik, dan bioteknologi.	Semakin berkurangnya lahan budidaya pertanian
			Green Industry	serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam melalui industri hijau.		
	Semakin berkurangnya lahan untuk pertanian, karena beralih fungsi menjadi perumahan dan lain-lain Minimnya petani tanaman pangan dan hortikultura yang menggunakan agroinput pertanian sesuai anjuran/rekomendasi			Konversi lahan pertanian (59% lahan dikuasai RT dan kepemilikan < 0,5 Ha)	Kota Pontianak sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Barat sebagai sentra pembangunan di semua sektor	Semakin berkurangnya lahan budidaya pertanian
				Program prioritas 1: Mencapai swasembada pangan, energi dan air		Minimnya petani tanaman pangan dan hortikultura yang menggunakan agroinput pertanian sesuai anjuran/ rekomendasi
				Quick Wins: 1) Memberi makanan bergizi sehat disekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil		Belum optimalnya ketersediaan prasarana pertanian

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Kedekatan dengan Laut Natuna potensi perikanan tangkap.	Aktifitas penangkapan ikan terkendala oleh cuaca sehingga nelayan tidak bisa melaut karena cuaca buruk.			Meningkatnya indeks kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan		Peningkatan produksi sektor perikanan yang berkelanjutan
Sungai Kapuas memberi potensi sektor perikanan	Terbatasnya alat tangkap yang dimiliki nelayan khususnya alat tangkap Bubu ikan					
	Belum optimalnya upaya peningkatan nilai tambah melalui pengolahan hasil perikanan dan jaminan keamanan			Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi produk hasil perikanan		Pemenuhan legalitas dan standar usaha perikanan
				Meningkatnya angka kesejahteraan masyarakat		Pengelolaan usaha perikanan berbasis lingkungan sesuai wilayah perkotaan dan produk olahan yang berdaya saing
	RPH Sapi masih dalam tahap pembangunan, sehingga jumlah pemotongan sapi tercatat menurun diduga pemotongan dilakukan diluar rumah potong hewan Pemerintah/tidak tercatat			Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi produk peternakan yang memiliki jaminan ASUH/ASU		Banyaknya peredaran produk pangan asal hewan yang tidak resmi/illegal dan masih banyak Unit usaha peredaran produk pangan asal hewan yang belum memiliki NKV (Nomor Kontrol Veteriner)
	Penataan pemotongan unggas yang memenuhi aspek Aman, Sehat, Utuh, dan Halal dan higiene sanitasi masih menjadi tugas			Meningkatnya angka kesejahteraan masyarakat		

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	tersendiri bagi Pemerintah Daerah					
	Banyak beredar obat-obatan ilegal tanpa izin Kementan untuk hewan/ ternak di petshop/poultry shop			Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan		Beredarnya obat-obatan ilegal tanpa izin Kementan di petshop/poultry shop
	Masih terjadi wabah penyakit zoonosis terutama Rabies dan Avian Influenza/flu burung			Penyakit Zoonosis yang Menjadi Ancaman : Rabies, Antraks, Flu Burung, Leptospirosis		Kewaspadaan terhadap penyakit zoonosis terutama Rabies dan Avian Influenza/flu burung (penyakit hewan yang menular pada manusia)

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

A. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu – isu utama bidang pangan, pertanian dan perikanan di Kota Pontianak.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak Tahun 2025 – 2029 adalah ” Meningkatkan kontribusi sektor pertanian dan perikanan dalam perekonomian serta meningkatnya ketahanan pangan”. Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan ini dapat diukur dengan indikator *1. Kontribusi Sektor Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB* *2. Indeks Ketahanan Pangan*, yaitu Pertumbuhan produksi barang dan jasa sektor pertanian dan perikanan di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu dan Susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama baik secara absolut maupun dari suatu pola konsumsi pangan.

B. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.

Sasaran di dalam Rencana Strategis Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak Tahun 2025 – 2029 adalah:

1. Meningkatkan Ketersediaan dan Konsumsi Pangan Per Kapita.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

- a) Ketersediaan energi per kapita (Kkal/Kapita/Hari)
- b) Konsumsi Energi Per Kapita (Kkal/Kapita/Hari)

2. Meningkatnya produksi hasil kelautan dan perikanan.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

- a) Angka Indeks Produksi Kelautan dan Perikanan (Persen)

3. Meningkatnya produktivitas tanaman pangan dan produksi tanaman hortikultura.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

1. Produktivitas tanaman pangan (Ku/Ha)

- a. Produktivitas Padi;
- b. Produktivitas Ubi Kayu;
- c. Produktivitas Keladi.

2. Produksi tanaman hortikultura

- a. Produksi Sayuran (Ton);
- b. Produksi Buah-buahan (Ton);
- c. Produksi Biofarmaka (Kg).

4. Meningkatnya produksi hasil peternakan.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

- a) Produksi daging ternak (Kg)

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	INDIKATOR (04)	BASELINE 2024 (05)	TARGET TAHUN						KETERANGAN (12)	
					2025 (06)	2026 (07)	2027 (08)	2028 (09)	2029 (10)	2030 (11)		
2.09.3.25.3.27.03.0000 - DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN												
- Meningkatnya Produktivitas Ekonomi - Meningkatnya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dan perikanan dalam perekonomian serta meningkatnya ketahanan pangan		Kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB (%)	1,06	1	1,05	1,1	1,15	1,2	1,3		
			Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks)	72,55	74,15	75,65	77,15	78,65	80,15	81,65		
		Meningkatnya Ketersediaan dan Konsumsi Pangan Per Kapita	Ketersediaan Energi Per Kapita (Kkal/Kapita/Hari)	3.210	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
			Konsumsi Energi Per Kapita (Kkal/Kapita/Hari)	1.918,5	1.950	1.990	2.030	2.070	2.100	2.100		
		Meningkatnya hasil produksi kelautan dan perikanan	Angka Indeks Produksi Kelautan dan Perikanan (%)	0	23,07	23,77	24,24	24,67	25,18	25,39		
		Meningkatnya Produktivitas Tanaman Pangan dan Produksi Tanaman Hortikultura	Produktivitas Padi (Kuintal/Ha)	28,6	34,42	34,42	34,6	34,6	34,7	34,7		
			Produktivitas Ubi Kayu (Kuintal/Ha)	223,46	223	223,64	223,64	224,3	225	225,6		
			Produktivitas Keladi (Kuintal/Ha)	143	142,1	143,08	143,08	143,5	143,5	144		
			Produksi Sayuran (Ton)	5.978	6.000	6.100	6.110	6.200	6.280	7.000		
			Produksi Buah-buahan (Ton)	741.449	2.400	2.440	2.480	2.500	2.520	2.540		
			Produksi Biofarmaka (Kg)	1.869.885	3.000	3.300	3.400	3.500	3.550	3.600		
		Meningkatnya produksi hasil peternakan	Produksi Daging Ternak (Kg)	16.472.314	6.164.885,6	6.226.534,46	622.879.980	635.168.780	6.415.204,68	6.479.356,73		

3.2 Cascading Kinerja

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/ pegawai yang lebih tinggi ke level unit/ pegawai yang lebih rendah. Cascading merupakan penyelarasan antara sasaran kinerja instansi yang diturunkan sampai ke sasaran kinerja pegawai pada setiap tingkat jabatan sehingga penilaian kinerja yang dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Cascading menjadi acuan, tanggung jawab dan ukuran kinerja mulai dari Kepala Dinas (esselon II) untuk Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, pejabat struktural (esselon III) untuk program, kegiatan dan subkegiatan.

Cascading kinerja Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel III.2 : Cascading Kinerja Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	KINERJA SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dan perikanan dalam perekonomian serta meningkatnya ketahanan pangan		1. Kontribusi Sektor Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB 2. Indeks Ketahanan Pangan										
	1. Meningkatnya Ketersediaan dan Konsumsi Pangan Per Kapita	Ketersediaan Energi Per Kapita Konsumsi Energi Per Kapita	1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Terwujudnya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPH), Cadangan Pangan (CPP) dan Pencapaian Target Konsumsi Pangan (KP)	Persentase Capaian Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPH), Cadangan Pangan (CPP) dan Pencapaian Target Konsumsi Pangan (KP).	1. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kota Dalam Rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Terlaksananya Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kota Dalam Rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Pokok	1. Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Konsumsi Pangan
									2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Terlaksananya pemantauan stok, pasokan dan harga pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	
									3. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	
					2. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Ketersediaan Cadangan Pangan Daerah Sesuai Standar	1. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	KINERJA SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB				
						3. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Terlaksananya Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	1. Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun 2. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber daya Lokal	Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber daya Lokal					
			2. Program Penanganan Kerawanan Pangan	Terwujudnya Peningkatan Tahan Pangan	Persentase Kecamatan Status Rentan Rawan Pangan	1. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentase Peningkatan Tahan Pangan	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota					
			3. Program Pengawasan Keamanan Pangan	Terwujudnya mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) sesuai standar yang ditetapkan	Persentase Kasus Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang tidak Sesuai Standar Mutu yang telah ditetapkan	1. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	1. Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Tersedianya dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan					
													2. Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Penerbitan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	
														3. Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota
	2. Meningkatnya hasil produksi kelautan dan perikanan	Angka Indeks Produksi Kelautan dan Perikanan	1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	1. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota.	Terlaksananya Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota.	1. Penyediaan Data dan Informasi Sumber daya Ikan 2. Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Bidang Perikanan				

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	KINERJA SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
						2. Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	1. Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	
									2. Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Terlaksananya Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan pengembangan Kelembagaannya	
									3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	
			2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	1. Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan Kecil	Terlaksananya pembinaan dan pendampingan dalam rangka pengembangan usaha perikanan budidaya	Jumlah Kegiatan pembinaan dan pendampingan dalam rangka pengembangan usaha perikanan budidaya	1. Pengembangan kapasitas pembudidayaan ikan kecil	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	
						2. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Terlaksananya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
									2. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
									3. Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ kota	Tersedianya Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	
			3. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha perikanan	Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan sesuai kewenangan kabupaten/Kota	1. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan	Meningkatnya pelaku usaha perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai	Jumlah pelaku usaha perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai	1. Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota yang diawasi	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	KINERJA SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
						Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	kewenangan di kab/kota	kewenangan di kab/kota	2. Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota yang diawasi	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	
									3. Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Yang Diawasi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	
			4. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Meningkatnya Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Terlaksananya Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	Jumlah kegiatan pelayanan Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	1. Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Terlaksananya pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	
						2. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya kegiatan penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	2. Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	
	3. Meningkatnya Produktivitas Tanaman Pangan dan Produksi	Produktivitas Tanaman Pangan :	1. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1. Meningkatnya jumlah petani tanaman pangan dan hortikultura yang menggunakan agroinput pertanian	Persentase petani tanaman pangan dan hortikultura yang menggunakan agroinput	1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Meningkatnya penggunaan sarana yang memenuhi standar	Persentase sarana yang memenuhi standar	1. Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi	Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	KINERJA SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB						
	Tanaman Hortikultura	- Produktivitas Padi		sesuai anjuran/rekomendasi	pertanian sesuai anjuran/rekomendasi				2. Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Bidang Pertanian						
		- Produktivitas Ubi Kayu							3. Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Meningkatnya Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak							
		- Produktivitas Keladi							2. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	Meningkatnya bibit Sumber Daya Genetik (SDG) bersertifikat	Persentase bibit Sumber Daya Genetik (SDG) bersertifikat	1. Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Terlaksananya Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah pelaksanaan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	UPT Agribisnis			
		Produksi Tanaman Hortikultura :										2. Meningkatkan jumlah kunjungan di UPTD Agribisnis	Persentase peningkatan jumlah kunjungan di UPTD Agribisnis	2. Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman		Meningkatnya Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	
		- Produksi Sayuran							2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1. Meningkatnya ketersediaan prasarana pertanian merupakan bahan berupa output yang dipergunakan untuk budidaya pertanian	Persentase Peningkatan Ketersediaan Prasarana Pertanian	1. Pembangunan Prasarana Pertanian	Meningkatnya Ketersediaan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Ketersediaan Prasarana Pertanian	1. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Bidang Pertanian
		- Produksi Buah-buahan													2. Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	
		- Produksi Biofarmaka													2. Terwujudnya Peningkatan Jumlah Ketersediaan Prasarana di UPT Agribisnis	Persentase Peningkatan Jumlah Ketersediaan Prasarana di UPT Agribisnis	3. Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya
									2. Pengembangan Prasarana Pertanian				Meningkatnya jumlah prasarana yang digunakan	Persentase Prasarana yang digunakan	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Bidang Pertanian
															2. Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Terlaksananya Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	KINERJA SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	
			3. Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Terfasilitasinya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase fasilitasi pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	1. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Luas areal yang dapat ditangani akibat dampak dari perubahan iklim dan OPT pada Tanaman Pangan dan Hortikultura	Luas areal yang dapat ditangani akibat dampak dari perubahan iklim dan OPT pada Tanaman Pangan dan Hortikultura	1. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan		
			4. Program Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya kapasitas kelembagaan penyuluh petani dan pelaku usaha	Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluh, petani dan pelaku agribisnis	1. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya Kelembagaan Petani dan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Kelembagaan Petani dan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1. Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya		
										2. Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa		Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya
4. Meningkatnya produksi hasil peternakan	Produksi Daging Ternak	1. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Terlaksananya penyediaan dan pengembangan sarana peternakan	Persentase Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Peternakan	1. Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terawasinya mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	1. Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Terlaksananya Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Bidang Peternakan		
					2. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terawasinya Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	2. Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak, Bahan Pakan/Pakan	Terawasinya Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan			

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	KINERJA SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB						
			2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Terwujudnya Pelayanan yang diberikan ke pengunjung Puskesmas	1. Persentase Pelayanan yang diberikan ke pengunjung Puskesmas	1. Pembangunan Prasarana Pertanian	Meningkatnya Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1. Persentase peningkatan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1. Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskesmas	Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi							
				Meningkatnya pelayanan RPH Sapi	2. Indeks kepuasan pelayanan RPH Sapi		Meningkatnya Jumlah pemotongan ternak di RPH Sapi	2. Jumlah pemotongan ternak di RPH Sapi	2. Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya rumah potong hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	UPT RPH Sapi						
			3. Program Perizinan Usaha Pertanian	Terlaksananya pengawasan perizinan usaha obat hewan	Persentase peningkatan unit usaha obat hewan yang memiliki izin	1. Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Meningkatnya jumlah pelaku usaha yang dibina	Jumlah pelaku usaha yang dibina	1. Fasilitas Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Terfasilitasinya Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang memenuhi Komitmen	Bidang Peternakan						
			4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Terlaksananya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Peningkatan pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	1. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya wilayah atau kawasan yang mengalami kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Persentase wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	1. Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota							
												2. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Meningkatnya Jumlah Masyarakat yang mengikuti kegiatan Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan	Jumlah Masyarakat yang mengikuti kegiatan Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan	1. Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/ SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Terkelolanya Penerbitan Rekomendasi Pemasukan, Rekomendasi Pengeluaran, Sertifikat Veteriner dan SKKH/SKPH untuk HPM	Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM	
															2. Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Terlaksananya Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	3. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan
												Bidang Peternakan						

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	KINERJA SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
						3. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Meningkatnya jumlah unit usaha yang melakukan penerapan dan pengawasan teknis kesejahteraan hewan	Jumlah unit usaha yang melakukan penerapan dan pengawasan teknis kesejahteraan hewan	1. Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	Terlaksananya Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan	

3.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Tujuan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak tahun 2025-2029 “Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dan perikanan dalam perekonomian serta meningkatnya ketahanan pangan” akan dicapai dengan penetapan sasaran yang dituangkan melalui strategi dan kebijakan. Adapun Strategi yang diterapkan dalam pencapaian sasaran dan tujuan, sebagaimana berikut ini:

1. Sasaran Meningkatnya Ketersediaan dan Konsumsi Pangan Per Kapita

Strategi : Stabilisasi ketersediaan stok dan harga pangan, penguatan cadangan pangan, pengembangan diversifikasi pangan, dan peningkatan keamanan pangan, serta penanganan kerawanan pangan.

2. Sasaran Meningkatnya hasil produksi kelautan dan perikanan
Strategi : Optimalisasi pengelolaan sumber daya perikanan tangkap, perikanan budidaya serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

3. Sasaran Meningkatnya Produktivitas Tanaman Pangan dan Produksi Tanaman Hortikultura

Strategi : Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan dan Produksi Tanaman Hortikultura

4. Sasaran Meningkatnya produksi hasil peternakan

Strategi : Optimalisasi penanganan dan pengendalian penyakit hewan dalam rangka peningkatan penyediaan pangan segar asal hewan

Strategi merupakan pendekatan umum atau rencana tindakan utama yang dirancang oleh perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Strategi merupakan serangkaian upaya yang dirancang secara sistematis dan terencana untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses pencapaian sasaran strategis dalam pembangunan daerah. Dalam konteks Pemerintah Kota Pontianak, strategi pembangunan tidak hanya berorientasi pada tujuan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan arah kebijakan jangka panjang guna menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Dalam penyusunannya, strategi pembangunan memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap dinamika pemerintahan dan pembangunan di Kota Pontianak. Faktor internal mencakup sumber daya manusia, kapasitas fiskal daerah, kebijakan daerah, serta potensi unggulan yang dimiliki. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kebijakan nasional, perkembangan ekonomi regional, kondisi sosial, serta tantangan global yang dapat memengaruhi implementasi strategi tersebut. Oleh karena itu, strategi pembangunan berperan sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan, program, dan langkah-langkah implementatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis

data, strategi pembangunan daerah diharapkan mampu mewujudkan visi dan misi Kota Pontianak secara efektif dan berkelanjutan.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan selama periode renstra 2025-2030 perlu dilakukan penahapan yang disusun berdasarkan urutan logis dari arah kebijakan strategis, tingkat urgensi permasalahan, ketersediaan sumber daya, serta kesinambungan antar program dan kegiatan. Pada awal periode, fokus diarahkan pada kegiatan dasar seperti pemetaan, penguatan kelembagaan, dan penyusunan model intervensi. Selanjutnya, tahapan dilanjutkan dengan peningkatan kapasitas, pelaksanaan kegiatan utama, evaluasi, dan pelebagaan praktik baik pada akhir periode Renstra. Dalam pelaksanaannya juga mempertimbangkan integrasi lintas sektor, keterlibatan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan, serta optimalisasi pemanfaatan data dan teknologi informasi.

Tabel 3.3 Penahapan Renstra Perangkat Daerah

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Inisiasi regulasi pembangunan dan pengembangan sektor pangan, perikanan dan pertanian	Percepatan implementasi pembangunan dan pengembangan sektor pangan, perikanan dan pertanian	Pengembangan pembangunan dan pengembangan sektor pangan, perikanan dan pertanian	Pemantapan pembangunan dan pengembangan sektor pangan, perikanan dan pertanian	Meningkatnya produksi dan produktivitas sektor pangan, perikanan dan pertanian, serta tercapainya Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang meliputi ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah disuatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak.

Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.4 Arah Kebijakan 2025-2029

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	KET
	Mewujudkan Perekonomian Inklusif, Stabil, Produktif, Kreatif, dan Inovatif			
1	2026	Inisiasi regulasi pembangunan aglomerasi ekonomi, dan pengembangan destinasi wisata dan ekonomi kreatif	Inisiasi regulasi pembangunan aglomerasi ekonomi sektor pangan, pertanian dan perikanan	
2	2027	Percepatan implementasi pembangunan aglomerasi ekonomi dan pengembangan	Percepatan implementasi pembangunan aglomerasi ekonomi sektor pangan,	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	KET
		destinasi wisata dan ekonomi kreatif	pertanian dan perikanan	
3	2028	Pengembangan pembangunan aglomerasi ekonomi dan pengembangan destinasi wisata dan ekonomi kreatif	Pengembangan pembangunan aglomerasi ekonomi sektor pangan, pertanian dan perikanan	
4	2029	Pemantapan aglomerasi ekonomi dan pengembangan destinasi wisata dan ekonomi kreatif	Pemantapan aglomerasi ekonomi sektor pangan, pertanian dan perikanan	
5	2030	Penguatan aglomerasi ekonomi dan pengembangan destinasi wisata dan ekonomi kreatif	Penguatan aglomerasi ekonomi sektor pangan, pertanian dan perikanan	

Berdasarkan tujuan, sasaran strategi dan kebijakan sebagaimana dijabarkan diatas, langkah berikutnya adalah menciptakan hubungan keterkaitan antara tujuan dan sasaran tersebut dengan program dan kegiatan/sub kegiatan berikut indikator kinerjanya untuk dituangkan dalam rencana strategis yang lebih operasional dalam kurun waktu lima tahun.

Rumusan kebijakan yang tepat akan menghasilkan program-program yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang akan dihadapi dan diselesaikan dalam jangka

waktu lima tahun mendatang. Program yang merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan akan dilaksanakan oleh suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sedangkan kegiatan/sub kegiatan adalah merupakan aktifitas operasional dari program yang bertolak ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya

BAB VI

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program Kegiatan dan Subkegiatan

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program kegiatan dan subkegiatan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak. Program kegiatan dan subkegiatan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi vertikal, untuk mencapai sasaran dan tujuan serta hasil yang diharapkan.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja untuk mencapai sasaran program. Kegiatan merupakan tindakan nyata yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan program.

Subkegiatan adalah bagian yang lebih spesifik dan rinci dari sebuah kegiatan. Subkegiatan merupakan langkah-langkah yang lebih terperinci dalam pelaksanaan sebuah kegiatan

Penyusunan Program, Kegiatan dan Subkegiatan pada Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak telah diselaraskan dengan nomenklatur terbaru berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 untuk menjaga konsistensi dan integrasi dengan sistem perencanaan dan penganggaran nasional. Program-Program inilah yang akan menjadi landasan utama dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan sehingga memastikan bahwa setiap kegiatan dan alokasi anggaran berjalan secara efektif, efisien dan akuntabel untuk mendukung Visi Pembangunan Kota Pontianak. Uraian Program, kegiatan dan subkegiatan dalam Renstra Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak disajikan dalam bentuk tabel berikut ini:

Tabel 4.1 : Teknik Merumuskan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)			
2.09.3.25.3.27.03.0000 - DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN										
- Meningkatnya Produktivitas Ekonomi - Meningkatnya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian dan perikanan serta Meningkatnya Ketahanan Pangan				Persentase peningkatan PDRB sektor pertanian dan perikanan (%)					
					Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks)					
		Meningkatnya Ketersediaan dan Konsumsi Pangan Per Kapita				Ketersediaan Energi Per Kapita (Kkal/Kapita/Hari)				
						Konsumsi Energi Per Kapita (Kkal/Kapita/Hari)				
			Terpenuhinya Layanan Administrasi Urusan Pemerintahan Daerah				Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
							Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	2.09.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
							Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	2.09.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	2.09.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.09.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	2.09.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2.09.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.09.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.09.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.09.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.09.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.09.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2.09.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.09.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.09.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	2.09.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	2.09.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	2.09.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	2.09.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	
				Terlaksananya pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	2.09.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2.09.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.09.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.09.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.09.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.09.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2.09.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	2.09.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.09.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.09.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Terlaksananya pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.09.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.09.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.09.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.09.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.09.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.09.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.09.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.09.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.09.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.09.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2.09.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2.09.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.09.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.09.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.09.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.09.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2.09.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2.09.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.09.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.09.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terlaksananya pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.09.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2.09.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.09.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.09.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.09.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.09.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.09.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.09.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.09.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.09.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.09.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.09.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.09.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.09.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.09.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.09.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.09.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2.09.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.09.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.09.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.09.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.09.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.09.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.09.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.09.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.09.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.09.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		2.09.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		2.09.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		2.09.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.09.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.09.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.09.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.09.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	2.09.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.09.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.09.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.09.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	2.09.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.09.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.09.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.09.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Terwujudnya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPH), Cadangan Pangan (CPP) dan Pencapaian Target Konsumsi Pangan (KP)		Persentase Capaian Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPH), Cadangan Pangan (CPP) dan Pencapaian Target Konsumsi Pangan (KP). (%)	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
			Terlaksananya Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kota Dalam Rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan		Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		
				Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis (Laporan)	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	2.09.03.2.01.0007 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		
				Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis (Laporan)	2.09.03.2.01.0014 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis		
				Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)	2.09.03.2.01.0016 - Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)		
				Terlaksananya Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton)	2.09.03.2.02 - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton)	2.09.03.2.02.0003 - Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)	2.09.03.2.04 - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	
					Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dokumen)	2.09.03.2.04 - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	
					Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dokumen)	2.09.03.2.04.0001 - Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	
					Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)	2.09.03.2.04.0002 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
			Terwujudnya Peningkatan Tahan Pangan		Persentase Kecamatan Status Rentan Rawan Pangan (%)	2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	
			Terlaksananya Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (Laporan)	2.09.04.2.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (Laporan)	2.09.04.2.02.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	
			Terwujudnya mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) sesuai standar yang ditetapkan		Persentase Kasus Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang tidak Sesuai Standar Mutu yang telah ditetapkan (%)	2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	
			Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	2.09.05.2.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.09.05.2.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota (Dokumen)	2.09.05.2.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.09.05.2.01.0004 - Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota (Dokumen)	2.09.05.2.01.0007 - Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	2.09.05.2.01.0009 - Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	
		Meningkatnya hasil produksi kelautan dan perikanan			Angka Indeks Produksi Kelautan dan Perikanan (%)		
			Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap		Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	
				Terlaksananya Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota.	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	3.25.03.2.01 - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (Unit)	3.25.03.2.01 - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	3.25.03.2.01.0001 - Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	
					Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (Unit)	3.25.03.2.01.0002 - Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (Kelompok)	3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil (Unit)	3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	3.25.03.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	
					Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (Kelompok)	3.25.03.2.02.0002 - Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil (Unit)	3.25.03.2.02.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	
			Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya		Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
				Terlaksananya pembinaan dan pendampingan dalam rangka pengembangan usaha perikanan budidaya	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)	3.25.04.2.02 - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
					Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)	3.25.04.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	
				Terlaksananya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (Dokumen)	3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
					Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
					Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	3.25.04.2.04.0002 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (Dokumen)	3.25.04.2.04.0004 - Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	3.25.04.2.04.0009 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha perikanan		Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota (%)	3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	
			Meningkatnya pelaku usaha perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan di kab/kota	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	3.25.05.2.01 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota		
				Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	3.25.05.2.01 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota		
				Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	3.25.05.2.01 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota		
				Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	3.25.05.2.01.0004 - Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	3.25.05.2.01.0006 - Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	
					Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	3.25.05.2.01.0007 - Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	
			Meningkatnya Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan		Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Ton)	3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	
				Terlaksananya Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)	3.25.06.2.02 - Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	
					Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)	3.25.06.2.02.0002 - Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	
				Terlaksananya kegiatan penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)	3.25.06.2.03 - Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)	3.25.06.2.03.0002 - Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Produktivitas Tanaman Pangan dan Produksi			Produktivitas Padi (Kuintal/Ha)		
					Produktivitas Ubi Kayu (Kuintal/Ha)		
					Produktivitas Keladi (Kuintal/Ha)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Tanaman Hortikultura			Produksi Sayuran (Ton)		
					Produksi Buah-buahan (Ton)		
					Produksi Biofarmaka (Kg)		
			Meningkatnya jumlah petani tanaman pangan dan hortikultura yang menggunakan agroinput pertanian sesuai anjuran/rekomendasi		Persentase petani tanaman pangan dan hortikultura yang menggunakan agroinput pertanian sesuai anjuran/ rekomendasi (%)	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Meningkatnya penggunaan sarana yang memenuhi standar	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak (Ton)	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
					Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
					Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
					Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	3.27.02.2.01.0001 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	
					Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	3.27.02.2.01.0002 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	
					Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak (Ton)	3.27.02.2.01.0003 - Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	
			Meningkatnya bibit Sumber Daya Genetik (SDG) bersertifikat		Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	3.27.02.2.02 - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	3.27.02.2.02.0003 - Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya ketersediaan prasarana pertanian merupakan bahan berupa output yang dipergunakan untuk budidaya pertanian		Persentase Peningkatan Ketersediaan Prasarana Pertanian (%)	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
				Meningkatnya jumlah prasarana yang digunakan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	
					Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan (Ha)	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	3.27.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	
					Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan (Ha)	3.27.03.2.01.0005 - Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	
				Meningkatnya Ketersediaan Prasarana Pertanian	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02.0003 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	
					Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02.0008 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	
			Terfasilitasinya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian		Persentase fasilitasi pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian (%)	3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
				Terfasilitasinya Luas areal yang dapat ditangani akibat dampak dari perubahan iklim dan OPT	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	3.27.05.2.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				pada Tanaman Pangan dan Hortikultura	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	3.27.05.2.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	
					Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	3.27.05.2.01.0001 - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
					Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	3.27.05.2.01.0002 - Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
			Meningkatnya kapasitas kelembagaan penyuluh petani dan pelaku usaha		Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluh, petani dan pelaku agribisnis (%)	3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
			Meningkatnya Kelembagaan Petani dan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya		Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
					Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
					Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	3.27.07.2.01.0001 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	
					Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	3.27.07.2.01.0002 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	
			Meningkatnya jumlah kunjungan di UPTD Agribisnis		Persentase peningkatan jumlah kunjungan di UPTD Agribisnis (%)	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
			Meningkatnya bibit Sumber Daya Genetik (SDG) bersertifikat		Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	3.27.02.2.02 - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	3.27.02.2.02.0002 - Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	
			Terwujudnya Peningkatan Jumlah Ketersediaan Prasarana di UPT		Persentase Peningkatan Jumlah Ketersediaan Prasarana di UPT Agribisnis (%)	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
			Meningkatnya Ketersediaan Prasarana Pertanian		Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02.0009 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
		Meningkatnya produksi hasil peternakan			Produksi Daging Ternak (Kg)		
		Terlaksananya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner			Peningkatan pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner (%)	3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
			terfasilitasinya wilayah atau kawasan yang mengalami kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota		Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan)	3.27.04.2.01 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan)	3.27.04.2.01.0008 - Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Jumlah Masyarakat yang mengikuti kegiatan Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan		Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan (Orang)	3.27.04.2.04 - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	
					Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan)	3.27.04.2.04 - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	
				Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM (Dokumen)	3.27.04.2.04 - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan)	3.27.04.2.04.0002 - Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	
					Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM (Dokumen)	3.27.04.2.04.0006 - Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	
					Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan (Orang)	3.27.04.2.04.0008 - Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan	
			Meningkatnya jumlah unit usaha yang melakukan penerapan dan pengawasan teknis kesejahteraan hewan		Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan (Unit)	3.27.04.2.05 - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	
					Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan (Unit)	3.27.04.2.05.0003 - Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	
			Terlaksananya pengawasan perizinan usaha obat hewan		Persentase peningkatan unit usaha obat hewan yang memiliki izin (%)	3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	
				Meningkatnya jumlah pelaku usaha yang dibina	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen (Laporan)	3.27.06.2.03 - Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	
					Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen (Laporan)	3.27.06.2.03.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	
			Terlaksananya penyediaan dan pengembangan sarana peternakan		Persentase Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Peternakan (%)	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Terlaksananya pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil (Laporan)	3.27.02.2.03 - Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil (Laporan)	3.27.02.2.03.0001 - Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan (Laporan)	3.27.02.2.05 - Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan (Laporan)	3.27.02.2.05.0006 - Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	
			Terwujudnya Pelayanan yang diberikan ke pengunjung Puskesmas		Persentase Pelayanan yang diberikan ke pengunjung Puskesmas (%)	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
			Meningkatnya Pelayanan Jasa Medik Veteriner		Jumlah Puskesmas yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Puskesmas yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	3.27.03.2.02.0014 - Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskesmas	
			Meningkatnya Pelayanan RPH Sapi		Indeks kepuasan pelayanan RPH Sapi (Nilai)	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
				Meningkatnya Jumlah pemotongan ternak di RPH Sapi	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	3.27.03.2.02.0015 - Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	

Rencana Startegis (Renstra) tahun 2025 – 2030 Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Kota Pontianak menetapkan rangkaian rencana program, kegiatan dan subkegiatan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan merupakan bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak yang memuat daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode lima tahun, dilengkapi dengan indikator kinerja, target tahunan, serta estimasi kebutuhan pendanaan. Rencana ini menjadi penjabaran operasional dari sasaran strategis Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak, yang disusun untuk mengarahkan pelaksanaan pembangunan sektoral, menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan (Renja PD) dan RKA, serta menghitung kebutuhan anggaran secara logis dan terukur. Rincian Rencana Program, Kegiatan, SubKegiatan, dan Pendanaan pada Tabel berikut:

Tabel 4.2 Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				14.411.975.566		15.021.519.919		14.930.122.400		15.350.880.131		15.775.670.604		
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				13.874.652.326		14.463.019.919		14.323.622.400		14.689.380.131		15.061.670.604		
Terpenuhinya Layanan Administrasi Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	100	100	13.874.652.326	100	14.463.019.919	100	14.323.622.400	100	14.689.380.131	100	15.061.670.604	2.09.3.25.3.27.03.0000 - DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
2.09.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				50.000.000		63.500.000		33.500.000		36.800.000		112.000.000		
Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	1	50.000.000	1	63.500.000	1	33.500.000	1	36.800.000	1	112.000.000		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	9	2		2		2		2		3			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0	6		6		6		6		6			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	17	5		5		5		5		5			
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	58		58		58		58		58			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	0	0		0		0		0		1			
2.09.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				25.000.000		8.000.000		8.000.000		9.000.000		9.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	9	2	25.000.000	2	8.000.000	2	8.000.000	2	9.000.000	3	9.000.000		
2.09.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0	1	0	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000		
2.09.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0		2.500.000		2.500.000		2.800.000		3.000.000		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0	1	0	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.800.000	1	3.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.09.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0	6	0	6	5.000.000	6	5.000.000	6	5.000.000	6	5.000.000		
2.09.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				25.000.000		8.000.000		8.000.000		9.000.000		9.000.000		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	17	5	25.000.000	5	8.000.000	5	8.000.000	5	9.000.000	5	9.000.000		
2.09.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				0		2.000.000		2.000.000		2.500.000		2.500.000		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	1	0	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.500.000	1	2.500.000		
2.09.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				0		2.000.000		2.000.000		2.500.000		2.500.000		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	58	0	58	2.000.000	58	2.000.000	58	2.500.000	58	2.500.000		
2.09.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0		30.000.000		0		0		75.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	0	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0	1	75.000.000			
2.09.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD				0		3.000.000			3.000.000			3.000.000			
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	0	2	0	2	3.000.000	2		3.000.000	2		3.000.000			
2.09.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						11.336.459.056			11.659.674.750			11.418.668.306			
Terlaksananya pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0	5		11.336.459.056	5		11.659.674.750	5		11.418.668.306	5		11.613.867.568	11.557.743.892
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	0	12			12			12			12			
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	6	4			4			4			4			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	50	80			80			80			80			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0	48			48			48			48			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.09.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				11.025.423.202		11.347.674.750		11.104.868.306		11.267.997.568		11.209.493.392		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	50	80	11.025.423.202	80	11.347.674.750	80	11.104.868.306	80	11.267.997.568	80	11.209.493.392		
2.09.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				300.000.000		300.000.000		300.000.000		330.000.000		330.000.000		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	0	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	330.000.000	12	330.000.000		
2.09.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				11.035.854		9.000.000		10.800.000		11.870.000		14.250.500		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	6	4	11.035.854	4	9.000.000	4	10.800.000	4	11.870.000	4	14.250.500		
2.09.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0		1.500.000		1.500.000		2.000.000		2.000.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0	5	0	5	1.500.000	5	1.500.000	5	2.000.000	5	2.000.000		
2.09.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				0		1.500.000		1.500.000		2.000.000		2.000.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	0	48	0	48	1.500.000	48	1.500.000	48	2.000.000	48	2.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)														
2.09.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				0		5.000.000		5.000.000		7.500.000		10.000.000			
Terlaksananya pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	1	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	7.500.000	1	10.000.000			
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	3		3		3		3		3				
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	10		10		10		10		10				
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	3		3		3		3		3				
	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	1		1		1		1		1				
2.09.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0		1.000.000		1.000.000		1.500.000		2.000.000			
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	1	0	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.500.000	1	2.000.000			
2.09.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				0		1.000.000		1.000.000		1.500.000		2.000.000			
Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	3	0	3	1.000.000	3	1.000.000	3	1.500.000	3	2.000.000			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.09.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0		1.000.000		1.000.000		1.500.000		2.000.000		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	3	0	3	1.000.000	3	1.000.000	3	1.500.000	3	2.000.000		
2.09.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0		1.000.000		1.000.000		1.500.000		2.000.000		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	10	0	10	1.000.000	10	1.000.000	10	1.500.000	10	2.000.000		
2.09.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0		1.000.000		1.000.000		1.500.000		2.000.000		
Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	1	0	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.500.000	1	2.000.000		
2.09.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				123.000.000		215.000.000		225.000.000		230.450.000		234.417.500		
Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	3	123.000.000	3	215.000.000	3	225.000.000	3	230.450.000	3	234.417.500		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	50	80		80		80		80		80			
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0	18		18		18		18		18			
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0	4		4		4		4		4			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.09.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				60.000.000		143.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	60.000.000	1	143.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000		
2.09.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0		1.000.000		1.000.000		2.000.000		2.000.000		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0	18	0	18	1.000.000	18	1.000.000	18	2.000.000	18	2.000.000		
2.09.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0		1.000.000		1.000.000		2.000.000		2.000.000		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0	4	0	4	1.000.000	4	1.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000		
2.09.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				48.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	3	48.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000		
2.09.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				15.000.000		20.000.000		23.000.000		26.450.000		30.417.500		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	50	80	15.000.000	80	20.000.000	80	23.000.000	80	26.450.000	80	30.417.500		
2.09.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				301.510.450		419.845.169		479.500.000		550.050.000		574.576.250		
Terlaksananya pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	301.510.450	1	419.845.169	1	479.500.000	1	550.050.000	1	574.576.250		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan (Paket)	1	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3	5		10		11		13		15			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	10	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	24		24		24		24		24			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		4		4		4		4			
2.09.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				12.750.000		20.000.000		35.000.000		50.000.000		50.000.000		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	12.750.000	1	20.000.000	1	35.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.09.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				94.768.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	94.768.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000		
2.09.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				19.554.450		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	19.554.450	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000		
2.09.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				13.892.000		15.000.000		20.000.000		23.000.000		26.450.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	4	13.892.000	4	15.000.000	4	20.000.000	4	23.000.000	4	26.450.000		
2.09.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				44.606.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		57.500.000		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	4	44.606.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	57.500.000		
2.09.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				5.940.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	24	5.940.000	24	6.000.000	24	6.000.000	24	6.000.000	24	6.000.000		
2.09.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50.000.000		137.845.169		177.500.000		229.050.000		227.626.250		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3	5	50.000.000	10	137.845.169	11	177.500.000	13	229.050.000	15	227.626.250		
2.09.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0		1.000.000		1.000.000		2.000.000		2.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	2	0	2	1.000.000	2	1.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000		
2.09.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				60.000.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000		80.000.000		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	10	12	60.000.000	12	65.000.000	12	65.000.000	12	65.000.000	12	80.000.000		
2.09.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				61.000.000		85.000.000		85.000.000		85.000.000		325.000.000		
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		2	61.000.000	6	85.000.000	6	85.000.000	6	85.000.000	8	325.000.000		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		4		4		4		4		4			
2.09.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				6.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		40.000.000		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		2	6.000.000	6	25.000.000	6	25.000.000	6	25.000.000	8	40.000.000		
2.09.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				45.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		4	45.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.09.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
2.09.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		230.000.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	230.000.000		
2.09.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.785.822.820		1.745.000.000		1.760.000.000		1.760.000.000		1.810.000.000		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	12	1.785.822.820	12	1.745.000.000	12	1.760.000.000	12	1.760.000.000	12	1.810.000.000		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	4		4		4		4		4			
2.09.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				8.568.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	4	8.568.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000		
2.09.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				431.713.196		435.000.000		450.000.000		450.000.000		500.000.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	12	431.713.196	12	435.000.000	12	450.000.000	12	450.000.000	12	500.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.09.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.345.541.624		1.300.000.000		1.300.000.000		1.300.000.000		1.300.000.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	12	1.345.541.624	12	1.300.000.000	12	1.300.000.000	12	1.300.000.000	12	1.300.000.000		
2.09.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				216.860.000		270.000.000		316.954.094		405.712.563		437.932.962		
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	216.860.000	1	270.000.000	1	316.954.094	1	405.712.563	1	437.932.962		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	21	21		21		21		21		21			
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)		25		25		25		25		25			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		26		30		50		50		70			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1		1		1		1		1			
2.09.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				150.860.000		200.000.000		200.000.000		250.000.000		250.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	21	21	150.860.000	21	200.000.000	21	200.000.000	21	250.000.000	21	250.000.000		
2.09.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				10.000.000		10.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)		25	10.000.000	25	10.000.000	25	15.000.000	25	15.000.000	25	15.000.000		
2.09.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				26.000.000		30.000.000		50.000.000		50.000.000		70.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		26	26.000.000	30	30.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	70	70.000.000		
2.09.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				25.000.000		25.000.000		46.954.094		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	25.000.000	1	25.000.000	1	46.954.094	1	50.000.000	1	50.000.000		
2.09.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.000.000		5.000.000		5.000.000		40.712.563		52.932.962		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	40.712.563	1	52.932.962		
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				396.286.940		410.500.000		458.500.000		513.500.000		566.000.000		
Terwujudnya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPH), Cadangan Pangan (CPP) dan Pencapaian Target Konsumsi Pangan (KP)	Persentase Capaian Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPH), Cadangan Pangan (CPP) dan Pencapaian Target Konsumsi Pangan (KP). (%)	0	100	396.286.940	100	410.500.000	100	458.500.000	100	513.500.000	100	566.000.000	2.09.3.25.3.27.03.0000 - DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan				134.127.100		135.500.000		153.500.000		168.500.000		188.500.000		
Terlaksananya Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kota Dalam Rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis (Laporan)	12	13	134.127.100	13	135.500.000	13	153.500.000	13	168.500.000	13	188.500.000		
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	2.000	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000			
	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)	13	13		13		13		13		13			
2.09.03.2.01.0007 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				34.778.400		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		
Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	2.000	2.000	34.778.400	2.000	35.000.000	2.000	35.000.000	2.000	35.000.000	2.000	35.000.000		
2.09.03.2.01.0014 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis				12.371.900		13.500.000		13.500.000		13.500.000		13.500.000		
Terlaksananya pemantauan stok, pasokan dan harga pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis (Laporan)	12	13	12.371.900	13	13.500.000	13	13.500.000	13	13.500.000	13	13.500.000		
2.09.03.2.01.0016 - Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)				86.976.800		87.000.000		105.000.000		120.000.000		140.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)	13	13	86.976.800	13	87.000.000	13	105.000.000	13	120.000.000	13	140.000.000		
2.09.03.2.02 - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota				148.377.000		160.000.000		165.000.000		180.000.000		190.000.000		
Terlaksananya Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton)		40	148.377.000	40	160.000.000	40	165.000.000	40	180.000.000	40	190.000.000		
2.09.03.2.02.0003 - Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				148.377.000		160.000.000		165.000.000		180.000.000		190.000.000		
Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton)		40	148.377.000	40	160.000.000	40	165.000.000	40	180.000.000	40	190.000.000		
2.09.03.2.04 - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi				113.782.840		115.000.000		140.000.000		165.000.000		187.500.000		
Terlaksananya Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)	2	2	113.782.840	2	115.000.000	2	140.000.000	2	165.000.000	2	187.500.000		
	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
2.09.03.2.04.0001 - Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				13.782.840		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dokumen)	2	2	13.782.840	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000		
2.09.03.2.04.0002 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				100.000.000		100.000.000		125.000.000		150.000.000		172.500.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)	2	2	100.000.000	2	100.000.000	2	125.000.000	2	150.000.000	2	172.500.000			
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				39.709.300		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000			
Terwujudnya Peningkatan Tahan Pangan	Persentase Kecamatan Status Rentan Rawan Pangan (%)	0	0	39.709.300	0	40.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	2.09.3.25.3.27.03.0000 - DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN		
2.09.04.2.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota				39.709.300		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000			
Terlaksananya Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (Laporan)	12	13	39.709.300	13	40.000.000	13	40.000.000	13	40.000.000	13	40.000.000			
2.09.04.2.02.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota				39.709.300		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000			
Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (Laporan)	12	13	39.709.300	13	40.000.000	13	40.000.000	13	40.000.000	13	40.000.000			
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				101.327.000		108.000.000		108.000.000		108.000.000		108.000.000			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terwujudnya mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) sesuai standar yang ditetapkan	Persentase Kasus Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang tidak Sesuai Standar Mutu yang telah ditetapkan (%)	0	4,5	101.327.000	4	108.000.000	3,5	108.000.000	3	108.000.000	2,5	108.000.000	2.09.3.25.3.27.03.0000 - DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
2.09.05.2.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota				101.327.000		108.000.000		108.000.000		108.000.000		108.000.000		
Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	12	12	101.327.000	12	108.000.000	12	108.000.000	12	108.000.000	12	108.000.000		
	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	6	6		6		6		6		6			
2.09.05.2.01.0004 - Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				6.452.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000		
Penerbitan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	6	6	6.452.000	6	8.000.000	6	8.000.000	6	8.000.000	6	8.000.000		
2.09.05.2.01.0007 - Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				55.865.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		
Tersedianya sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota (Dokumen)	1	1	55.865.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
2.09.05.2.01.0009 - Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				39.010.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000			
Tersedianya dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	12	12	39.010.000	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000			
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				730.000.000		811.000.000		834.500.000		865.000.000		868.950.000			
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				245.000.000		268.000.000		273.000.000		275.000.000		275.000.000			
Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	795,19	764	245.000.000	772	268.000.000	780	273.000.000	788	275.000.000	796	275.000.000	2.09.3.25.3.27.03.0000 - DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN		
3.25.03.2.01 - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				20.000.000		36.500.000		41.500.000		41.500.000		41.500.000			
Terlaksananya Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota.	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (Unit)	0	1	20.000.000	1	36.500.000	1	41.500.000	1	41.500.000	1	41.500.000			
	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	2	2		2		2		2		2				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.25.03.2.01.0001 - Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan				15.000.000		16.500.000		16.500.000		16.500.000		16.500.000		
Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	2	2	15.000.000	2	16.500.000	2	16.500.000	2	16.500.000	2	16.500.000		
3.25.03.2.01.0002 - Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap				5.000.000		20.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		
Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (Unit)	0	1	5.000.000	1	20.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000		
3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota				225.000.000		231.500.000		231.500.000		233.500.000		233.500.000		
Terlaksananya Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (Kelompok)	2	2	225.000.000	2	231.500.000	2	231.500.000	2	233.500.000	2	233.500.000		
	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	30	30		30		30		30		30			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil (Unit)	0	2		2		2		2		2			
3.25.03.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil				15.000.000		16.500.000		16.500.000		16.500.000		16.500.000		
Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	30	30	15.000.000	30	16.500.000	30	16.500.000	30	16.500.000	30	16.500.000		
3.25.03.2.02.0002 - Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil				10.000.000		15.000.000		15.000.000		17.000.000		17.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (Kelompok)	2	2	10.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	17.000.000	2	17.000.000		
3.25.03.2.02.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil (Unit)	0	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000		
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				455.000.000		458.000.000		466.500.000		475.000.000		478.950.000		
Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	255,38	264	455.000.000	280	458.000.000	297	466.500.000	315	475.000.000	319	478.950.000	2.09.3.25.3.27.03.0000 - DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
3.25.04.2.02 - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil				25.000.000		25.000.000		30.000.000		34.500.000		35.000.000		
Terlaksananya pembinaan dan pendampingan dalam rangka pengembangan usaha perikanan budidaya	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)	30	30	25.000.000	30	25.000.000	30	30.000.000	30	34.500.000	30	35.000.000		
3.25.04.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil				25.000.000		25.000.000		30.000.000		34.500.000		35.000.000		
Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)	30	30	25.000.000	30	25.000.000	30	30.000.000	30	34.500.000	30	35.000.000		
3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan				430.000.000		433.000.000		436.500.000		440.500.000		443.950.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	1	1	430.000.000	1	433.000.000	1	436.500.000	1	440.500.000	1	443.950.000		
	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	0	3		3		3		3		3			
	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (Dokumen)	1	2		2		2		2		2			
3.25.04.2.04.0002 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				15.000.000		16.500.000		20.000.000		23.000.000		26.450.000		
Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	0	3	15.000.000	3	16.500.000	3	20.000.000	3	23.000.000	3	26.450.000		
3.25.04.2.04.0004 - Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				15.000.000		16.500.000		16.500.000		17.500.000		17.500.000		
Tersedianya Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (Dokumen)	1	2	15.000.000	2	16.500.000	2	16.500.000	2	17.500.000	2	17.500.000		
3.25.04.2.04.0009 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		
Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	1	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha perikanan	Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota (%)	0	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	2.09.3.25.3.27.03.0000 - DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
3.25.05.2.01 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota				15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
Meningkatnya pelaku usaha perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan di kab/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	0	5	15.000.000	5	15.000.000	5	15.000.000	5	15.000.000	5	15.000.000		
	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	0	5		5		5		5		5			
	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	0	5		5		5		5		5			
3.25.05.2.01.0004 - Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Terawasnya usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	0	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.25.05.2.01.0006 - Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota yang diawasi	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	0	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000		
3.25.05.2.01.0007 - Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Yang Diawasi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	0	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000		
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				15.000.000		70.000.000		80.000.000		100.000.000		100.000.000		
Meningkatnya Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Ton)	1.984	1.800	15.000.000	1.820	70.000.000	1.830	80.000.000	1.850	100.000.000	1.860	100.000.000	2.09.3.25.3.27.03.0000 - DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.25.06.2.02 - Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil				10.000.000		35.000.000		40.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)	5	2	10.000.000	2	35.000.000	2	40.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000		
3.25.06.2.02.0002 - Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko				10.000.000		35.000.000		40.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)	5	2	10.000.000	2	35.000.000	2	40.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000		
3.25.06.2.03 - Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				5.000.000		35.000.000		40.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya kegiatan penyediaan dan penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)	0	1	5.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.25.06.2.03.0002 - Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				5.000.000		35.000.000		40.000.000		50.000.000		50.000.000		
Tersedianya Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)	0	1	5.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				7.715.223.805		9.037.652.500		4.295.967.500		4.473.554.750		4.486.954.500		
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				765.000.000		2.065.052.500		2.080.052.500		2.149.052.500		2.149.052.500		
Meningkatnya jumlah kunjungan di UPTD Agribisnis	Persentase peningkatan jumlah kunjungan di UPTD Agribisnis (%)	15,5	2	265.000.000	2	265.000.000	2	265.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	2.09.3.25.3.27.03.0000 - DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
3.27.02.2.02 - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota				390.000.000		390.000.000		390.000.000		450.000.000		450.000.000		
Meningkatnya bibit Sumber Daya Genetik (SDG) bersertifikat	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	12	1	265.000.000	1	265.000.000	1	265.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000		
3.27.02.2.02.0002 - Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				265.000.000		265.000.000		265.000.000		300.000.000		300.000.000		
Meningkatnya Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	12	1	265.000.000	1	265.000.000	1	265.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya jumlah petani tanaman pangan dan hortikultura yang menggunakan agroinput pertanian sesuai anjuran/rekomendasi	Persentase petani tanaman pangan dan hortikultura yang menggunakan agroinput pertanian sesuai anjuran/rekomendasi (%)	30	42	390.000.000	43	1.689.552.500	44	1.704.552.500	45	1.738.552.500	46	1.738.552.500		
3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian				265.000.000		1.564.552.500		1.579.552.500		1.588.552.500		1.588.552.500		
Meningkatnya penggunaan sarana yang memenuhi standar	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak (Ton)	0	2	265.000.000	3	1.564.552.500	4	1.579.552.500	5	1.588.552.500	6	1.588.552.500		
	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	0	4		4		4		4		4			
3.27.02.2.01.0001 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				1.000.000		1.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	0	4	1.000.000	4	1.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000		
3.27.02.2.01.0002 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				262.000.000		1.551.552.500		1.552.552.500		1.561.552.500		1.561.552.500		
Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	4	4	262.000.000	4	1.551.552.500	4	1.552.552.500	4	1.561.552.500	4	1.561.552.500		
3.27.02.2.01.0003 - Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih				2.000.000		12.000.000		22.000.000		22.000.000		22.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya benih bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk biji/benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak (Ton)	0	2	2.000.000	3	12.000.000	4	22.000.000	5	22.000.000	6	22.000.000		
3.27.02.2.02 - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota				390.000.000		390.000.000		390.000.000		450.000.000		450.000.000		
Meningkatnya bibit Sumber Daya Genetik (SDG) bersertifikat	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	4	4	125.000.000	4	125.000.000	4	125.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000		
3.27.02.2.02.0003 - Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				125.000.000		125.000.000		125.000.000		150.000.000		150.000.000		
Termanfaatkannya SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	4	4	125.000.000	4	125.000.000	4	125.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000		
Terlaksananya penyediaan dan pengembangan sarana peternakan	Persentase Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Peternakan (%)	100	100	110.000.000	100	110.500.000	100	110.500.000	100	110.500.000	100	110.500.000		
3.27.02.2.03 - Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota				5.000.000		5.500.000		5.500.000		5.500.000		5.500.000		
Terlaksananya pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil (Laporan)	1	12	5.000.000	12	5.500.000	12	5.500.000	12	5.500.000	12	5.500.000		
3.27.02.2.03.0001 - Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil				5.000.000		5.500.000		5.500.000		5.500.000		5.500.000		
Terawasnya Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan	1	12	5.000.000	12	5.500.000	12	5.500.000	12	5.500.000	12	5.500.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil (Laporan)														
3.27.02.2.05 - Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota				105.000.000		105.000.000		105.000.000		105.000.000		105.000.000			
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan (Laporan)	1	12	105.000.000	12	105.000.000	12	105.000.000	12	105.000.000	12	105.000.000			
3.27.02.2.05.0006 - Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan				105.000.000		105.000.000		105.000.000		105.000.000		105.000.000			
Terawasanya Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan (Laporan)	1	12	105.000.000	12	105.000.000	12	105.000.000	12	105.000.000	12	105.000.000			
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				6.431.188.305		6.417.000.000		1.642.000.000		1.732.000.000		1.732.000.000			
Meningkatnya ketersediaan prasarana pertanian merupakan bahan berupa output yang dipergunakan untuk budidaya pertanian	Persentase Peningkatan Ketersediaan Prasarana Pertanian (%)	20	32	289.945.875	33	292.000.000	34	292.000.000	35	292.000.000	36	292.000.000	2.09.3.25.3.27.03.0000 - DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN		
3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian				2.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000			
Meningkatnya jumlah prasarana yang digunakan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	0	4	2.000.000	4	7.000.000	4	7.000.000	4	7.000.000	4	7.000.000			
	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan (Ha)	0	184		184		184		184		184				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				1.000.000		3.500.000		3.500.000		3.500.000		3.500.000		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	0	4	1.000.000	4	3.500.000	4	3.500.000	4	3.500.000	4	3.500.000		
3.27.03.2.01.0005 - Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian				1.000.000		3.500.000		3.500.000		3.500.000		3.500.000		
Terkendali dan termanfaatkannya kawasan pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan (Ha)	0	184	1.000.000	184	3.500.000	184	3.500.000	184	3.500.000	184	3.500.000		
3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian				6.429.188.305		6.410.000.000		1.635.000.000		1.725.000.000		1.725.000.000		
Meningkatnya Ketersediaan Prasarana Pertanian	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	1	1	287.945.875	1	285.000.000	1	285.000.000	1	285.000.000	1	285.000.000		
	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	2	2		2		2		2		2			
3.27.03.2.02.0003 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	1	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000		
3.27.03.2.02.0008 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya				87.945.875		85.000.000		85.000.000		85.000.000		85.000.000		
Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun,	2	2	87.945.875	2	85.000.000	2	85.000.000	2	85.000.000	2	85.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)														
Meningkatnya Pelayanan RPH Sapi	Indeks kepuasan pelayanan RPH Sapi (Nilai)	95	95	423.636.561	95	425.000.000	95	430.000.000	95	500.000.000	95	500.000.000			
3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian				6.429.188.305		6.410.000.000		1.635.000.000		1.725.000.000		1.725.000.000			
Meningkatnya Jumlah pemotongan ternak di RPH Sapi	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	1	1	423.636.561	1	425.000.000	1	430.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000			
3.27.03.2.02.0015 - Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan				423.636.561		425.000.000		430.000.000		500.000.000		500.000.000			
Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya rumah potong hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	1	1	423.636.561	1	425.000.000	1	430.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000			
Terwujudnya Pelayanan yang diberikan ke pengunjung Puskesmas	Persentase Pelayanan yang diberikan ke pengunjung Puskesmas (%)	0	100	717.605.869	100	700.000.000	100	700.000.000	100	720.000.000	100	720.000.000			
3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian				6.429.188.305		6.410.000.000		1.635.000.000		1.725.000.000		1.725.000.000			
Meningkatnya Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Puskesmas yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	0	1	717.605.869	1	700.000.000	1	700.000.000	1	720.000.000	1	720.000.000			
3.27.03.2.02.0014 - Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskesmas				717.605.869		700.000.000		700.000.000		720.000.000		720.000.000			
Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	0	1	717.605.869	1	700.000.000	1	700.000.000	1	720.000.000	1	720.000.000			
Terwujudnya Peningkatan Jumlah Ketersediaan Prasarana di UPT	Persentase Peningkatan Jumlah Ketersediaan Prasarana di UPT Agribisnis (%)	5	1	5.000.000.000	1	5.000.000.000	1	220.000.000	1	220.000.000	1	220.000.000			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian				6.429.188.305		6.410.000.000		1.635.000.000		1.725.000.000		1.725.000.000		
Meningkatnya Ketersediaan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	1	1	5.000.000.000	1	5.000.000.000	1	220.000.000	1	220.000.000	1	220.000.000		
3.27.03.2.02.0009 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya				5.000.000.000		5.000.000.000		220.000.000		220.000.000		220.000.000		
Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	1	1	5.000.000.000	1	5.000.000.000	1	220.000.000	1	220.000.000	1	220.000.000		
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				307.500.600		329.600.000		339.915.000		352.502.250		365.902.000		
Terlaksananya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Peningkatan pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner (%)	0	10	307.500.600	10	329.600.000	10	339.915.000	10	352.502.250	10	365.902.000	2.09.3.25.3.27.03.0000 - DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
3.27.04.2.01 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota				39.040.000		41.000.000		45.000.000		50.000.000		55.000.000		
terfasilitasinya wilayah atau kawasan yang mengalami kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan)	4	12	39.040.000	12	41.000.000	12	45.000.000	12	50.000.000	12	55.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.04.2.01.0008 - Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				39.040.000		41.000.000		45.000.000		50.000.000		55.000.000		
Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan)	4	12	39.040.000	12	41.000.000	12	45.000.000	12	50.000.000	12	55.000.000		
3.27.04.2.04 - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner				110.949.000		128.600.000		134.915.000		142.502.250		150.902.000		
Meningkatnya Jumlah Masyarakat yang mengikuti kegiatan Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan (Orang)	0	330	110.949.000	340	128.600.000	350	134.915.000	360	142.502.250	370	150.902.000		
	Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan)	0	4		4		4		4		4			
3.27.04.2.04.0002 - Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				13.500.000		30.000.000		34.500.000		40.000.000		46.000.000		
Terawasinya Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan)	0	4	13.500.000	4	30.000.000	4	34.500.000	4	40.000.000	4	46.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.04.2.04.0006 - Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)				11.000.000		12.100.000		13.915.000		16.002.250		18.402.000		
Terkelolanya Penerbitan Rekomendasi Pemasukan, Rekomendasi Pengeluaran, Sertifikat Veteriner dan SKKH/SKPH untuk HPM	Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM (Dokumen)	4	4	11.000.000	4	12.100.000	4	13.915.000	4	16.002.250	4	18.402.000		
3.27.04.2.04.0008 - Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan				86.449.000		86.500.000		86.500.000		86.500.000		86.500.000		
Terlaksananya kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan (Orang)	0	330	86.449.000	340	86.500.000	350	86.500.000	360	86.500.000	370	86.500.000		
3.27.04.2.05 - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan				157.511.600		160.000.000		160.000.000		160.000.000		160.000.000		
Meningkatnya jumlah unit usaha yang melakukan penerapan dan pengawasan teknis kesejahteraan hewan	Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan (Unit)	1	1	157.511.600	1	160.000.000	1	160.000.000	1	160.000.000	1	160.000.000		
3.27.04.2.05.0003 - Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha				157.511.600		160.000.000		160.000.000		160.000.000		160.000.000		
Terlaksananya pembinaan penerapan kesejahteraan hewan pada unit usaha	Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan (Unit)	1	1	157.511.600	1	160.000.000	1	160.000.000	1	160.000.000	1	160.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				40.000.000		53.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		
Terfasilitasinya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase fasilitasi pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian (%)	0	62	40.000.000	63	53.000.000	64	60.000.000	65	60.000.000	66	60.000.000	2.09.3.25.3.27.03.0000 - DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
3.27.05.2.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota				40.000.000		53.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		
Terfasilitasinya Luas areal yang dapat ditangani akibat dampak dari perubahan iklim dan OPT pada Tanaman Pangan dan Hortikultura	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	0	10	40.000.000	10	53.000.000	10	60.000.000	10	60.000.000	10	60.000.000		
	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	0	10		10		10		10		10			
3.27.05.2.01.0001 - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				20.000.000		28.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	0	10	20.000.000	10	28.000.000	10	30.000.000	10	30.000.000	10	30.000.000		
3.27.05.2.01.0002 - Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				20.000.000		25.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	0	10	20.000.000	10	25.000.000	10	30.000.000	10	30.000.000	10	30.000.000		
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN				12.000.000		13.000.000		14.000.000		15.000.000		15.000.000		
Terlaksananya pengawasan perizinan usaha obat hewan	Persentase peningkatan unit usaha obat hewan yang memiliki izin (%)	0	5	12.000.000	5	13.000.000	5	14.000.000	5	15.000.000	5	15.000.000	2.09.3.25.3.27.03.0000 - DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
3.27.06.2.03 - Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan				12.000.000		13.000.000		14.000.000		15.000.000		15.000.000		
Meningkatnya jumlah pelaku usaha yang dibina	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen (Laporan)	4	4	12.000.000	4	13.000.000	4	14.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000		
3.27.06.2.03.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan				12.000.000		13.000.000		14.000.000		15.000.000		15.000.000		
Terfasilitasinya Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen (Laporan)	4	4	12.000.000	4	13.000.000	4	14.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000		
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				159.534.900		160.000.000		160.000.000		165.000.000		165.000.000		
Meningkatnya kapasitas kelembagaan penyuluh petani dan pelaku usaha	Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluh, petani dan pelaku agribisnis (%)	20	42	159.534.900	43	160.000.000	44	160.000.000	45	165.000.000	46	165.000.000	2.09.3.25.3.27.03.0000 - DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				159.534.900		160.000.000		160.000.000		165.000.000		165.000.000		
Meningkatnya Kelembagaan Petani dan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	2	2	159.534.900	2	160.000.000	2	160.000.000	2	165.000.000	2	165.000.000		
	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	3	4		4		4		4		4			
3.27.07.2.01.0001 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa				104.534.900		105.000.000		105.000.000		105.000.000		105.000.000		
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	2	2	104.534.900	2	105.000.000	2	105.000.000	2	105.000.000	2	105.000.000		
3.27.07.2.01.0002 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa				55.000.000		55.000.000		55.000.000		60.000.000		60.000.000		
Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	3	4	55.000.000	4	55.000.000	4	55.000.000	4	60.000.000	4	60.000.000		

Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak secara khusus mendukung Program Prioritas Kota Pontianak Tahun 2025-2029 pada Misi ke-4 “Mewujudkan Perekonomian Inklusif, Stabil, Produktif, Kreatif, dan Inovatif”, dengan Sasaran Meningkatnya Produktivitas Ekonomi dan Meningkatnya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah Adapun sub kegiatan mendukung program prioritas pembangunan daerah dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 4.3 Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
1.	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Terwujudnya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPH), Cadangan Pangan (CPP) dan Pencapaian Target Konsumsi Pangan (KP)	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
			2.09.03.2.01.0007 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	
			2.09.03.2.01.0014 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	
			2.09.03.2.01.0016 - Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	
			2.09.03.2.02 - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	
			2.09.03.2.02.0003 - Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
			2.09.03.2.04 - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	
			2.09.03.2.04.0001 - Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	
			2.09.03.2.04.0002 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
2.	2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Terwujudnya Peningkatan Tahan Pangan	2.09.04.2.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.09.04.2.02.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	
3.	2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Terwujudnya mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) sesuai standar yang ditetapkan	2.09.05.2.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	
			2.09.05.2.01.0004 - Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	
			2.09.05.2.01.0007 - Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
			2.09.05.2.01.0009 - Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	
4.	3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	3.25.03.2.01 - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
			3.25.03.2.01.0001 - Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	
			3.25.03.2.01.0002 - Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	
			3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			3.25.03.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	
			3.25.03.2.02.0002 - Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	
			3.25.03.2.02.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	
5.	3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	3.25.04.2.02 - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
			3.25.04.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	
			3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
			3.25.04.2.04.0002 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			3.25.04.2.04.0004 - Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			3.25.04.2.04.0009 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
6.	3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha perikanan	3.25.05.2.01 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	
			3.25.05.2.01.0004 - Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	
			3.25.05.2.01.0006 - Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	
			3.25.05.2.01.0007 - Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
7.	3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	3.25.06.2.02 - Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	
			3.25.06.2.02.0002 - Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	
			3.25.06.2.03 - Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
			3.25.06.2.03.0002 - Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
8.	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya jumlah petani tanaman pangan dan hortikultura yang menggunakan agroinput pertanian sesuai anjuran/rekomendasi	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
			3.27.02.2.01.0001 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	
			3.27.02.2.01.0002 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	
			3.27.02.2.01.0003 - Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	
		Meningkatnya jumlah kunjungan di UPTD Agribisnis	3.27.02.2.02 - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya jumlah petani tanaman pangan dan hortikultura yang menggunakan agroinput pertanian sesuai anjuran/rekomendasi	3.27.02.2.02 - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya jumlah kunjungan di UPTD Agribisnis	3.27.02.2.02.0002 - Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	
		Meningkatnya jumlah petani tanaman pangan dan hortikultura yang menggunakan agroinput pertanian sesuai anjuran/rekomendasi	3.27.02.2.02.0003 - Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	
		Terlaksananya penyediaan dan pengembangan sarana peternakan	3.27.02.2.03 - Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			3.27.02.2.03.0001 - Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	
3.27.02.2.05 - Pengendalian dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan				

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
			Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			3.27.02.2.05.0006 - Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	
9.	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya ketersediaan prasarana pertanian merupakan bahan berupa output yang dipergunakan untuk budidaya pertanian	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	
			3.27.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	
			3.27.03.2.01.0005 - Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	
		Meningkatnya Pelayanan RPH Sapi	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
		Terwujudnya Peningkatan Jumlah Ketersediaan Prasarana di UPT	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
		Terwujudnya Pelayanan yang diberikan ke pengunjung Puskesmas	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
		Terwujudnya Peningkatan Jumlah Ketersediaan Prasarana di UPT	3.27.03.2.02.0009 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
		Terwujudnya Pelayanan yang diberikan ke pengunjung Puskesmas	3.27.03.2.02.0014 - Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskesmas	
		Meningkatnya Pelayanan RPH Sapi	3.27.03.2.02.0015 - Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	
10.	3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Terlaksananya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	3.27.04.2.01 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	
			3.27.04.2.01.0008 - Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			3.27.04.2.04 - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	
			3.27.04.2.04.0002 - Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	
			3.27.04.2.04.0006 - Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	
			3.27.04.2.04.0008 - Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
			3.27.04.2.05 - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	
			3.27.04.2.05.0003 - Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	
11.	3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Terfasilitasinya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	3.27.05.2.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	
			3.27.05.2.01.0001 - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
			3.27.05.2.01.0002 - Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
12.	3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Terlaksananya pengawasan perizinan usaha obat hewan	3.27.06.2.03 - Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	
			3.27.06.2.03.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	
13.	3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Meningkatnya kapasitas kelembagaan penyuluh petani dan pelaku usaha	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
			3.27.07.2.01.0001 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	
			3.27.07.2.01.0002 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	

Indikator Kinerja Kunci (IKK), atau yang lebih dikenal sebagai Key Performance Indicators (KPI), adalah metrik terukur yang digunakan untuk mengevaluasi seberapa efektif suatu organisasi, tim, atau individu dalam mencapai tujuan bisnis utamanya. IKK bukanlah sekadar alat ukur, melainkan panduan strategis yang membantu memfokuskan upaya, mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan, dan memastikan bahwa semua pihak bergerak ke arah yang sama untuk mencapai sasaran organisasi. Mengukur IKK secara teratur memungkinkan manajemen untuk mengambil keputusan yang cepat dan tepat, mengalokasikan sumber daya dengan lebih efisien, dan mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN										
2.	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)		%	105.52	100	100	100	100	100	100	
3.	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN										
4.	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	positif	Ton	1044.16	991	1028	1052	1077	1103	1115	
5.	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN										
6.	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	negatif	%	-74	-5.55	-5.88	-6.25	-6.67	-7.14	-7.69	
7.	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	positif	%	286	344.2	344.2	346	346	347	347	

4.3 Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan surat dari Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Nomor : B/000.7.2/733/BAPPERIDA/2025 Tanggal 1 Juli 2025 Hal : Pedoman Penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029. Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak untuk tahun 2026 - 2030 mendapat target pendapatan seperti dalam tabel berikut:

Tabel 4.6 Target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2026 - 2030

NO	URAIAN PENDAPATAN	TAHUN				
		2026	2027	2028	2029	2030
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Retribusi Penyewaan Bangunan)	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000
2	Retribusi Rumah Potong Hewan	1.166.400.000	1.209.540.000	1.253.457.000	1.298.189.850	1.343.779.343
3	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Berupa Bibit atau Benih Tanaman dan Bibit atau Benih Ikan)	93.520.000	96.045.000	98.566.000	101.065.000	103.620.000
4	Retribusi Pelayanan Kesehatan (Puskesmas)	156.664.800	159.862.500	167.855.625	176.249.000	185.061.000
5	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	41.600.000	42.400.000	43.200.000	44.000.000	44.800.000
	JUMLAH	1.482.184.800	1.531.847.500	1.587.078.625	1.643.503.850	1.701.260.343

4.4 Program Strategis Nasional

Program Strategis Nasional (PSN) adalah inisiatif pemerintah yang dirancang untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan di Indonesia. Program ini memiliki sifat yang strategis karena dampaknya luas, tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetapi juga untuk mendukung pembangunan di berbagai daerah.

Tujuan utama dari PSN adalah untuk mempercepat perbaikan dan ketersediaan infrastruktur nasional. Dengan adanya infrastruktur yang memadai, diharapkan efisiensi dan produktivitas perekonomian nasional dapat meningkat. Renstra 2025 – 2029 terdapat program, kegiatan dan subkegiatan yang mendukung program strategis nasional untuk

mewujudkan **“Ketahanan Pangan”** dengan proyek/ kegiatan Pendayagunaan Penyuluh Pertanian dan Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian (Sawah/Lumbung Pangan/ Food Estate). Dukungan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak terhadap program strategis nasional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.7 Dukungan Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak terhadap Program Strategis Nasional

No	Pro SN	Proyek/ Kegiatan	Sasaran Renstra	Indikator Renstra	Program	Kegiatan	Rencana Aksi	Satuan	Target dan Anggaran												
									2025		2026		2027		2028		2029		2030		
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Ketahanan Pangan	Swasembada Pangan (Irigasi Untuk Mendukung Swasembada Pangan)																			
		Pendayagunaan Penyuluh Pertanian	Meningkatnya Produktivitas Tanaman Pangan dan Produksi Tanaman Hortikultura	Produktivitas Padi	Program Penyuluhan Pertanian	Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa	Optimalisasi Penyuluh Pertanian	Unit	2	36.134.900	2	104.534.900	2	105.000.000	2	105.000.000	2	105.000.000	2	105.000.000	
						Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa	Optimalisasi Penyuluh Pertanian	Unit	4	55.000.000	4	55.000.000	4	55.000.000	4	55.000.000	4	60.000.000	4	60.000.000	
		Pengadaan Dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta penyaluran cadangan Beras Pemerintah																			
		Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian (Sawah/Lumbung Pangan/ Food Estate)	Meningkatnya Produktivitas Tanaman Pangan dan Produksi Tanaman Hortikultura	Produktivitas Padi	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Bantuan sarana untuk kelompok tani (Padi, bibit sayuran, pupuk, peralatan pertanian)	Laporan	4	162.069.900	4	262.000.000	4	252.000.000	4	253.000.000	4	262.000.000	4	262.000.000	

4.5 Program Unggulan dan Prioritas Kepala Daerah

Dalam RPJMD Kota Pontianak tahun 2025-2029 Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak mengampu Misi ke-4 yaitu “Mewujudkan Perekonomian Inklusif, Stabil, Produktif, Kreatif dan Inofatif”. Misi ini mendukung visi Sejahtera dengan menekankan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pemberdayaan usaha kecil dan menengah, pengembangan sektor pariwisata dan kuliner halal, serta pelatihan dalam bidang e-commerce akan membuka lapangan kerja baru, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan daya saing ekonomi masyarakat di era digital.

Berikut ini program-program Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang berkaitan dengan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak pada saat pendaftaran sebagai bakal calon kepala daerah pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah pada tahun 2024. Program-program tersebut mendukung misi kepala daerah. Visi dan misi kepala daerah terpilih selanjutnya akan menjadi visi misi rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Pontianak tahun 2025-2029.

Tabel 4.8 Program Unggulan Kepala Daerah

NO	MISI	PROGRAM UNGGULAN
1	Mewujudkan Perekonomian Inklusif, Stabil, Produktif, Kreatif dan Inofatif	<p>a. Program Budidaya Ikan dan Hewan Ternak, pemerintah akan memberikan pelatihan dana bantuan bagi warga yang ingin memulai budidaya ikan atau beternak hewan</p> <p>b. Program Gapoktan Aktif dan Produktif, program ini membantu kelompok tani (gapoktan) agar lebih produktif dalam mengelola lahan pertanian</p>

Program prioritas pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih. Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Kota Pontianak menetapkan rangkaian program sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90

Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Klasifikasi perencanaan pembangunan dan keuangan daerah terdiri atas :

1. Program penunjang urusan Pemerintah daerah;
2. Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
3. Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
4. Urusan pilihan;
5. Unsur pendukung urusan pemerintahan;
6. Unsur penunjang urusan pemerintahan;
7. Unsur pengawas;
8. Unsur kewilayahan;
9. Unsur pemerintahan umum; dan
10. Unsur kekhususan.

Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan absolut yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, urusan pemerintahan konkuren yang kewenangannya dibagi antara Pemerintah Pusat dan Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak mengampu pada urusan:

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, yang berhubungan dengan pangan;
2. Urusan Pemerintahan Pilihan, yang berhubungan dengan kelautan dan perikanan serta pertanian

Berikut program prioritas kepala daerah yang berhubungan dengan Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.9 Program Prioritas Kepala daerah

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	TANGGUNG PRIORITAS NASIONAL
Mewujudkan Perekonomian Inklusif, Stabil, Produktif, Kreatif dan Inofatif	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berdaya saing	Meningkatnya produktivitas ekonomi		Laju Pertumbuhan Ekonomi		ASTA CITA 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan,

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	TANGGUNG PRIORITAS NASIONAL
			Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
			Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
			Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha perikanan		Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	
			Meningkatnya Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	
			1. Meningkatkan jumlah petani tanaman pangan dan hortikultura yang menggunakan agroinput pertanian sesuai anjuran/rekomendasi		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	
			2. Meningkatkan jumlah kunjungan di UPTD Agribisnis			
			3. Terlaksananya penyediaan dan pengembangan sarana peternakan			
			1. Meningkatkan ketersediaan prasarana pertanian merupakan bahan berupa output yang dipergunakan untuk budidaya pertanian		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
			2. Terwujudnya Peningkatan Jumlah Ketersediaan Prasarana di UPT Agribisnis			
			3. Terwujudnya Pelayanan yang diberikan ke pengunjung Puskesmas			
			4. Meningkatkan pelayanan RPH Sapi			
			Terfasilitasinya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian		Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	
			Meningkatnya kapasitas kelembagaan penyuluh petani dan pelaku usaha		Program Penyuluhan Pertanian	
			Terlaksananya pengawasan perizinan usaha obat hewan		Program Perizinan Usaha Pertanian	

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	TANGGUNG PRIORITAS NASIONAL
			Terlaksananya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
		Meningkatnya ketahanan pangan		Indeks Ketahanan Pangan (IKP)		
			Terwujudnya Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPH), Cadangan Pangan (CPP) dan Pencapaian Target Konsumsi Pangan (KP)		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	
			Terwujudnya Peningkatan Tahan Pangan		Program Penanganan Kerawanan Pangan	
			Terwujudnya mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) sesuai standar yang ditetapkan		Program Pengawasan Keamanan Pangan	

4.6 Proyek Strategis

Berdasarkan surat dari Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Nomor : B/000.7.2/733/BAPPERIDA/2025 Tanggal 1 Juli 2025 Hal : Pedoman Penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029. Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak untuk tahun 2026 – 2030 terdapat proyek strategis yang akan dilaksanakan.

Tabel 4.10 Rencana Proyek Strategis

NO	SUBKEGIATAN	RENCANA PEKERJAAN/ PROYEK/ AGENDA	TAHUN					LOKASI
			2026	2027	2028	2029	2030	
1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Pembangunan Gedung UPT Agribisnis	5.000.000	5.000.000				UPT AGRIBISNIS
2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Ekstensifikasi Lahan Tanam Lidah Buaya		1.299.552.500	1.299.552.500	1.299.552.500	1.299.552.500	Kecamatan Pontianak Utara

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak berlaku selama lima tahun dari tahun 2025 hingga 2029. Renstra Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya. Secara lebih spesifik, penjabaran mengenai Renstra Tahun 2025-2029 ini diharapkan juga dapat menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) untuk tahun - tahun mendatang

Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan, dalam melaksanakan seluruh kegiatannya akan mengacu kepada Renstra yang telah disusun bersama komponen dinas yang terkait. Konsekuensinya komitmen yang tinggi harus diberikan dalam tahap pelaksanaannya, baik oleh seluruh komponen Pemerintah Kota Pontianak maupun segenap lapisan masyarakat (petani, pihak swasta serta pihak lain yang terkait).

Guna mencapai hasil yang optimal, sangat diharapkan ada tindak lanjut dari rumusan Renstra ini. Apabila terdapat kegiatan yang pelaksanaannya belum berjalan optimal, padahal kegiatan tersebut erat kaitannya dengan misi pembangunan pangan, pertanian dan perikanan di Kota Pontianak yang seharusnya berjalan sesuai dengan rencana menjadi tidak terformulasikan dengan baik.

Untuk itu sekali lagi sangat dibutuhkan kesadaran dan tanggung jawab seluruh stake holder yang terkait, bahwa berhasilnya pembangunan pangan, pertanian dan perikanan di Kota Pontianak juga menuntut peran serta aktif dari berbagai pihak, serta Pemerintah Kota juga harus mampu memfasilitasi dan mengkoordinir seluruh proses yang ada dengan memberikan pelayanan yang kondusif. Jika kondisi ini dapat diciptakan, maka suatu sinergi yang ideal akan terbentuk yang pada akhirnya akan mempertinggi akselerasi Kota Pontianak.

WALI KOTA PONTIANAK

EDI RUSDI KAMTONO